

**ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, PERTUMBUHAN
EKONOMI, DAN IPM TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2003-2022**

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Maulida Sania Taufikkurrohmah
Nomor Mahasiswa : 20313154
Prodi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
YOGYAKARTA**

2024

ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, PERTUMBUHAN
EKONOMI, DAN IPM TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2003-2022

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan,
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Maulida Sania Taufikkurrohmah
Nomor Mahasiswa : 20313154
Prodi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
YOGYAKARTA
2024**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Maret 2024

Penulis,



Maulida Sania Taufikkurrohmah

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN IPM TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2003-2022

Nama : Maulida Sania Taufikkurrohmah
Nomor Mahasiswa : 20313154
Prodi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 11 Maret 2024
telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing,



Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Aze Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. ibu@uii.ac.id
W. ibu.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada Semester Genap 2023/2024, hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama : MAULIDA SANIA TAUFIKKURROHMAH
NIM : 20313154
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL,
PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN IPM TERHADAP
KETIMPANGAN PENDAPATAN DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2003-2022
Dosen Pembimbing : Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Skripsi) tersebut dinyatakan:

Lulus

Nilai : A

Referensi : Layak ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji:

Ketua Tim : Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.

Anggota Tim : Dra. Sarasri Mumpuni R, M.Si.



Yogyakarta, 17 Mei 2024

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan,

Abdul Hakim, SE, M.Ec., Ph.D.
NIK. 963130101

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

FISKAL, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN IPM TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI DAERAH ISTI

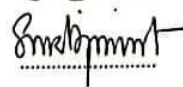
Disusun oleh : MAULIDA SANIA TAUFIKKURROHMAH

Nomor Mahasiswa : 20313154

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Jum'at, 17 Mei 2024

Penguji/Pembimbing Skripsi : Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.

Penguji : Dra. Sarasatri Mumpuni R, M.Si.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. 

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sudah memberikan segala rezeki bagi penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2022”. Skripsi ini dipersembahkan penulis kepada Bapak Samsudin dan Ibu Umi Mahmudah selaku Ayah dan Ibu penulis yang selalu mendukung serta mendoakan yang terbaik bagi penulis. Skripsi ini juga dipersembahkan bagi seluruh rakyat Indonesia.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala zat yang Maha Sempurna pemberi rahmat dan kasih sayang kepada semua makhluk-Nya. Shalawat serta salam juga tidak lupa dihaturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalaam yang sudah membawa umat manusia dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang. Sehingga penulis bisa untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2022”**. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak terdapat kekurangan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari pihak manapun untuk bisa menyempurnakan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bimbingan, arahan, kritik, doa, dan dukungan. Oleh sebab itu, penulis ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sudah memberikan rezeki dan limpahan rahmat-Nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar
2. Terima kasih kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalaam, insan kamil yang sudah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang dengan menggunakan cahaya ilmu pengetahuan.
3. Bapak Samsudin dan Ibu Umi Mahmudah selaku orang tua penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis
4. Bapak Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberi arahan dan bimbingan ketika menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Indonesia

6. Bapak Johan Arifin, SE, M.Si, Ph.D, CFrA, CIPSAS selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
7. Amar Luky Sulistyawan selaku kakak penulis yang selalu mensupport penulis
8. Sonia Nur Afifa, Hikmatiaara Frischa Abrori, dan Nabila Salva Ningtyas teman seperjuangan penulis yang selalu mendukung penulis
9. Teman-teman dekat penulis selama berkuliah di Universitas Islam Indonesia. Berbagai kritik dan masukan akan penulis terima agar skripsi ini bisa menjadi lebih baik. Semoga dengan adanya skripsi ini bisa memberikan manfaat. Aamiin Ya Robbal 'alamin

Yogyakarta, 21 Maret 2024

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'M' and 'S' with a small star symbol to the right.

Maulida Sania Taufikkurrohmah

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Judul Skripsi	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Berita Acara Ujian Tugas Akhir Skripsi.....	v
Halaman Persembahan.....	vii
Halaman Kata Pengantar.....	viii
Halaman Daftar Isi	x
Halaman Daftar Tabel	xiii
Halaman Daftar Gambar	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xv
Halaman Abstrak	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	10
2.1. Kajian Pustaka.....	10
2.2. Landasan Teori.....	19
2.2.1. Ketimpangan Pendapatan	19
2.2.2. Desentralisasi Fiskal.....	23
2.2.3. Pertumbuhan Ekonomi.....	29
2.2.4. Indeks Pembangunan Manusia.....	33
2.3. Hubungan Antar Variabel	35
2.4. Kerangka Pemikiran	38

2.5. Hipotesis Penelitian.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1. Jenis dan Cara Pengumpulan Data.....	40
3.2. Definisi Operasional Variabel.....	40
3.3. Metode Analisis Data.....	42
3.4. Pendekatan Model Koreksi Kesalahan.....	43
3.4.1. Uji Akar Unit.....	43
3.4.2. Uji Derajat Integrasi.....	43
3.4.3. Uji Kointegrasi.....	44
3.4.4. Uji <i>Error Correction Model</i> (ECM).....	45
3.5. Uji Asumsi Klasik	46
3.5.1. Uji Multikolinieritas.....	46
3.5.2. Uji Heteroskedastisitas.....	47
3.5.3. Uji Autokorelasi.....	47
3.5.4. Uji Linieritas	47
3.6. Pengujian Hipotesis.....	48
3.6.1. Koefisien Determinasi	48
3.6.2. Uji F Statistik.....	48
3.6.3. Uji T Statistik	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1. Deskripsi Data Penelitian	50
4.2. Hasil Analisis	51
4.2.1. Uji Stasioner Data (<i>Unit Root</i>).....	51
4.2.2. Uji Kointegrasi.....	53
4.3. Analisis Pengujian Statistik Estimasi <i>Error Correction Model</i> (ECM)	54
4.3.1. Hasil Pengujian Jangka Panjang	54
4.3.2. Hasil Pengujian Persamaan Jangka Pendek	58

4.4. Pengujian Asumsi Klasik	61
4.4.1. Uji Heteroskedastisitas.....	61
4.4.2. Uji Multikolinearitas.....	62
4.4.3. Uji Normalitas.....	63
4.4.4. Uji Autokorelasi.....	63
4.4.5. Uji Linearitas	64
4.5. Analisis Ekonomi.....	65
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	70
5.1. Kesimpulan.....	70
5.2. Implikasi.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
DAFTAR LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 4.1. Analisis Statistik Deskriptif	50
Tabel 4.2. Hasil Uji Stasioner Data.....	51
Tabel 4.3. Hasil Uji Kointegrasi	53
Tabel 4.4. Model Jangka Panjang.....	54
Tabel 4.5. Model Jangka Pendek.....	58
Tabel 4.6. Uji Heteroskedastisitas	61
Tabel 4.7. Uji Multikolinearitas	62
Tabel 4.8. Uji Normalitas	63
Tabel 4.9. Uji Autokorelasi	64
Tabel 4.10. Uji Linieritas	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Rasio Gini di Indonesia Tahun 1984-2013.....	1
Gambar 1.2. Rasio Gini pada Daerah Ketimpangan Tertinggi Tahun 2022.....	3
Gambar 1.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (2012- 2022).....	5
Gambar 1. 4 Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (2010- 2022).....	7
Gambar 2.1. Kurva Lorenz.....	22
Gambar 2.2. Kurva U-terbalik.....	23
Gambar 2.3. Bagan Kerangka Pemikiran.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Tabel Data Penelitian.....	78
Lampiran II Uji Stasioneritas.....	79
Lampiran III Uji Kointegrasi.....	91
Lampiran IV Uji ECM.....	92
Lampiran V Uji Asumsi Klasik	94

ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN IPM TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2003-2022

ABSTRAK

Ketimpangan pendapatan menjadi masalah bagi negara maju maupun berkembang. Pada tahun 2022 provinsi dengan ketimpangan pendapatan tertinggi di Indonesia ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menurut Arsyad salah satu kendala dalam mengatasi ketimpangan pendapatan adalah dibutuhkan dana yang besar. Upaya yang dapat dilakukan untuk menangani hal tersebut adalah dengan desentralisasi fiskal. Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat menunjukkan bahwa pendapatan di suatu wilayah akan meningkat serta pendapatan penduduk akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau dapat dikatakan pertumbuhan memberi efek cucuran ke bawah atau *trickle down effect* pada perekonomian suatu wilayah. Hal ini dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Peningkatan kualitas manusia menjadi fokus utama dalam pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan serta kualitas masyarakat suatu daerah. Apabila IPM meningkat, maka produktivitas masyarakat akan meningkat sehingga tingkat pendapatan akan meningkat. IPM yang merata di setiap daerah dapat untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2022. Data yang digunakan adalah data time series dengan metodenya *Error Correction Model* (ECM). Hasil dari penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Untuk Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya dalam jangka pendek. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Kata kunci : *desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ketimpangan pendapatan*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketimpangan distribusi pendapatan adalah distribusi tidak merata di antara berbagai rumah tangga pada suatu negara. Dengan kata lain, ketimpangan pendapatan adalah perbedaan jumlah pendapatan masyarakat sehingga berakibat pada perbedaan pendapatan yang lebih besar antar kelompok masyarakat tersebut. Komponen inti dalam masalah pembangunan selain kemiskinan adalah ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan menjadi masalah bagi setiap negara di seluruh dunia, baik negara maju maupun berkembang (Todaro & Smith, 2011).



Gambar 1.1. Rasio Gini di Indonesia Tahun 1984-2013

Sumber : Badan Pusat Statistik (2024)

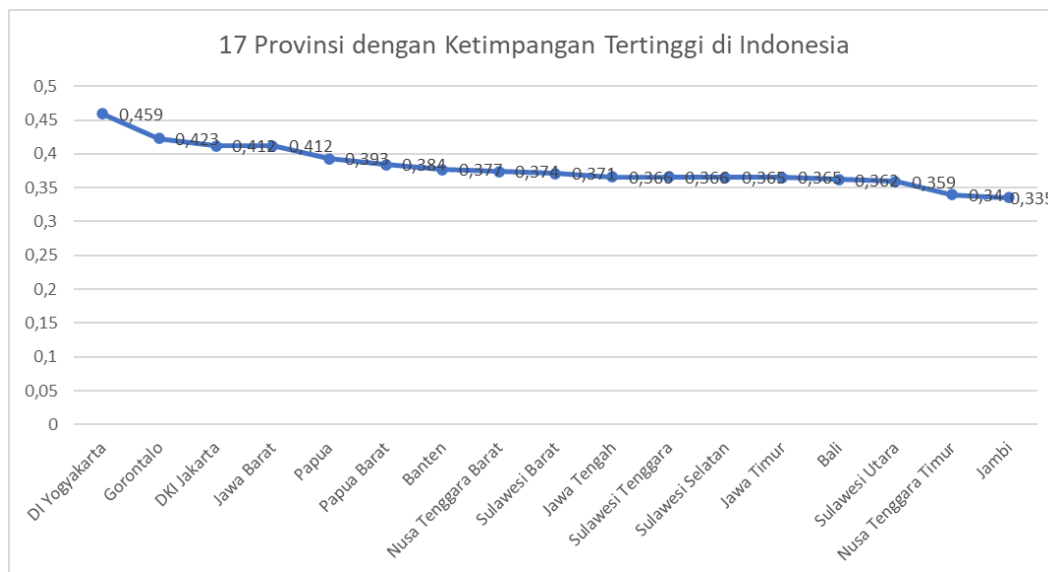
Sesudah berakhirnya krisis ekonomi di tahun 1997-1998 ketimpangan pendapatan di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat. Seperlima kelompok rumah tangga terkaya di Indonesia melakukan konsumsi 38,9 persen dari total pengeluaran nasional di tahun 1990. Pada tahun 2014 distribusi ini semakin

memburuk sebab 20 persen warga terkaya melakukan konsumsi dengan persentase hampir setengah dari total pengeluaran nasional, yaitu 47,4 persen. Keadaan pada konsumsi rumah tangga 20 persen kelas ekonomi bawah justru memprihatinkan sebab persentase dibandingkan konsumsi nasional mengalami penurunan dari 9,4 persen di tahun 1990 menjadi 7,2 persen di tahun 2014 (Kuntoro dkk., 2020)

Krisis ekonomi tahun 1997 atau 1998 mengakibatkan depresiasi rupiah yang tajam sehingga perekonomian Indonesia jatuh. Pada saat itu terjadi kesulitan memperoleh barang input impor sehingga sektor industri pengolahan cukup terdampak atas peristiwa krisis ekonomi. Pada tahun 2000-an perekonomian global mulai membaik serentak dengan pertumbuhan pesat Tiongkok dan India. Permintaan bahan mentah menjadi tinggi karena adanya pertumbuhan pesat beberapa negara sehingga mendorong terjadinya lonjakan harga komoditas di pasar internasional (*commodity booming*). Booming harga komoditas dinikmati oleh negara Indonesia selama tahun 2001-2012. Struktur ekspor Indonesia pada periode tersebut didominasi oleh ekspor sumber daya alam, seperti gas alam, karet, kelapa sawit, dan lain-lain. Indonesia kemudian mampu untuk keluar dari krisis serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memanfaatkan ekspor tersebut. Bahkan secara rata-rata besar pertumbuhan ekonominya sebesar 5,24 persen setiap tahunnya. Namun, kemudian muncul permasalahan baru, yaitu pendapatan nasional yang berasal dari perdagangan komoditas tersebut tidak merata dalam pendistribusiannya (Kuntoro dkk., 2020).

Menurut Wihardja (2016) deindustrialisasi dini akibat mini Dutch Disease karena adanya commodity price booming menjadi salah satu penyebab ketimpangan pendapatan Indonesia tinggi setelah tahun 2000. Apresiasi nilai tukar rupiah yang terjadi karena peningkatan ekspor komoditas mengakibatkan sektor selain ekspor bahan alam kurang kompetitif di pasar internasional, termasuk sektor industri. Hal ini berakibat pada share sektor industri menjadi turun serta transformasi ekonomi justru terjadi dari sektor pertanian ke sektor jasa informal. Pada periode tahun 1998-2013

indeks gini Indonesia secara rata-rata sederhana sebesar 0,3397 dengan angka tertingginya adalah 0,413 dan angka terendah sebesar 0,29 (Utami, 2020)



Gambar 1.2. Rasio Gini pada Daerah Ketimpangan Tertinggi Tahun 2022

Sumber : Badan Pusat Statistika (BPS) Data diolah, 2023

Menurut BPS (2022) nilai ketimpangan di Indonesia sebesar 0,381. Namun, di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta rasio gininya melampaui provinsi-provinsi besar lainnya, yaitu Jakarta, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, dan Sumatera Utara serta menjadikan provinsi ini sebagai provinsi dengan ketimpangan tertinggi di Indonesia. Di urutan kedua adalah Gorontalo dengan rasio gini 0,423 dan yang ketiga adalah DKI Jakarta dengan rasio gini 0,412. Dari 17 provinsi dengan nilai ketimpangan pendapatan tertinggi, enam diantaranya berada di atas angka ketimpangan nasional.

Menurut Lincoln Arsyad (2010) ada tiga kendala dalam mengatasi ketimpangan pendapatan, yaitu 1) Pendanaan yang sangat besar, sedangkan di negara sedang berkembang anggarannya masih terbatas; 2) Anggaran yang dikeluarkan tidak sesuai dengan target karena hubungan antara masyarakat pedesaan (golongan miskin)

dengan institusi formal (pemerintah) terbatas; 3.) Hambatan politik. Masyarakat kalangan bawah biasanya mempunyai kekuatan politik yang lemah.

Berdasar pada permasalahan diatas maka, diperlukan dana yang besar untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Cara untuk melaksanakan hal tersebut salah satunya dengan menerapkan desentralisasi fiskal. Menurut Diantha et al (2013) sistem pemerintahan terdesentralisasi sudah diadopsi oleh Indonesia dan didukung dengan kebijakan desentralisasi fiskal yang berlandaskan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 terkait dengan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah agar desentralisasi bisa berjalan lebih optimal. Tujuan dari kebijakan desentralisasi fiskal ini salah satunya adalah mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah maupun antardaerah. Hal ini searah dengan fungsi dari salah satu komponen penting desentralisasi fiskal, yaitu dana perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil yang mempunyai proporsi terbesar pada sistem tersebut. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Menurut UU No. 19 tahun 2023 pengertian Dana Alokasi Umum adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah. Menurut Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2022 pengertian Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Undang Undang No. 1 Tahun 2022 pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ikke, dkk (2020) kesejahteraan masyarakat bisa diukur salah satunya dengan melihat pertumbuhan ekonominya. Apabila pertumbuhan ekonomi semakin meningkat menunjukkan bahwa pendapatan di suatu wilayah akan meningkat serta pendapatan penduduk akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau bisa dikatakan pertumbuhan memberi efek cucuran ke bawah atau *trickle down effect* pada perekonomian suatu wilayah. Hal ini bisa mengurangi ketimpangan pendapatan. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Anzwar (2016:10) menyatakan bahwa sebagian besar negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia, baik di tingkat nasional maupun regional, hanya ada suatu golongan masyarakat tertentu saja yang menjadi donatur terbesar pada pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada adanya manfaat dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri tidak bersifat inklusif sehingga kemiskinan dan ketimpangan akan semakin memburuk.



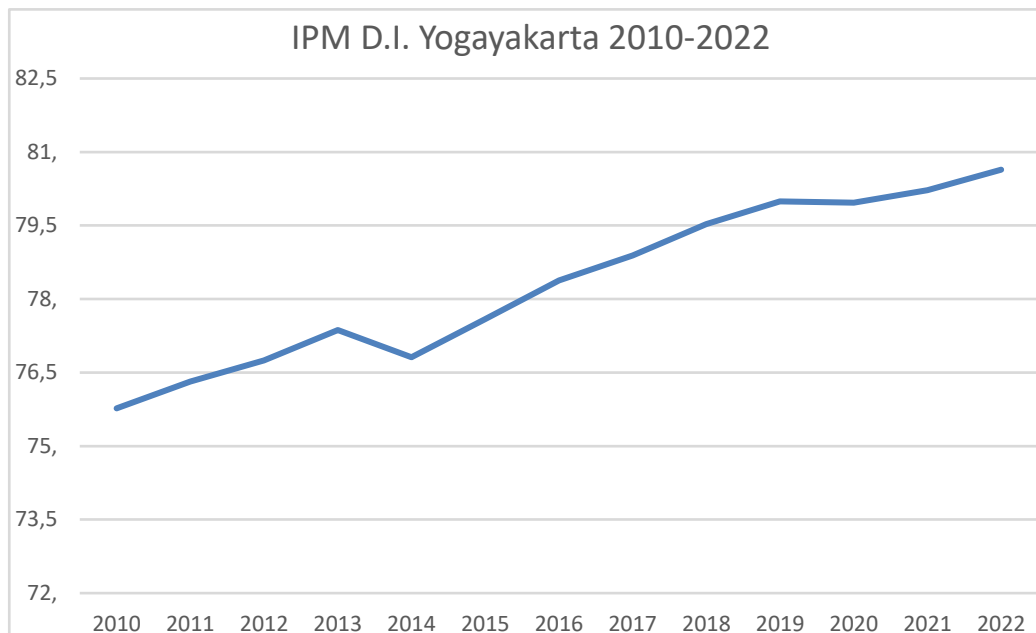
Gambar 1.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (2012-2022)

Sumber : Badan Pusat Statistika (BPS) Data diolah, 2023

Berdasarkan grafik diatas, diketahui pertumbuhan ekonomi provinsi D.I. Yogyakarta mempunyai pola horizontal di tahun 2012-2017. Pada dua tahun

berikutnya kemudian mengalami peningkatan. Namun, di tahun 2020 pertumbuhan ekonominya mengalami kemerosotan yang begitu tajam, hal ini disebabkan salah satu hal yang sangat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi, yaitu masalah pandemi Covid-19 di Indonesia. Di tahun 2021 kemudian pertumbuhan ekonomi provinsi D.I. Yogyakarta mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya Covid-19 di Indonesia. Namun, di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi provinsi D.I. Yogyakarta kembali menurun.

Peningkatan kualitas manusia menjadi fokus utama dalam pembangunan (Kuncoro, 2010). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan serta kualitas masyarakat suatu daerah. Pada IPM terdapat tiga dimensi dasar, yaitu bidang kesehatan (umur harapan hidup), pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta standar hidup layak. Apabila IPM meningkat, maka produktivitas masyarakat akan meningkat sehingga tingkat pendapatan akan meningkat, hal sebaliknya juga berlaku. Apabila tingkat IPM berbeda di setiap daerahnya, maka hal ini bisa menyebabkan ketimpangan pendapatan (Pradnyadewi & Purbadharmaja, 2017). Namun, apabila IPM bisa merata di semua daerah maka, ketimpangan pendapatan bisa menurun.



Gambar 1. 4 Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (2010-2022)

Sumber : Badan Pusat Statistika (BPS) Data diolah, 2024

IPM di D.I. Yogyakarta hingga tahun 2020 berada pada angka 79,97 dan berada dalam level “IPM tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Level IPM di tahun 2020 sedikit menurun daripada di tahun 2019 karena penurunan indeks pada dimensi standar hidup yang layak dan tidak layak mampu dikompensasi menggunakan dua dimensi lain, yaitu kesehatan dan pendidikan. Pada masa pandemi Covid-19, terjadi penurunan tajam pada daya beli masyarakat sehingga pengeluaran perkapita riil yang sudah disesuaikan tercatat lebih rendah dari tahun 2019. Secara umum, IPM di D.I. Yogyakarta terus mengalami kemajuan selama satu dekade terakhir. IPM D.I. Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar 75,37 menjadi 79,97 pada tahun 2020 atau setiap tahun tumbuh dengan rata-rata 0,59 persen. Hal ini menandakan perkembangan IPM di D.I. Yogyakarta semakin baik. Level IPM D.I. Yogyakarta juga selalu lebih tinggi daripada level IPM nasional. IPM D.I. Yogyakarta selalu berada pada posisi kedua

tertinggi setelah DKI Jakarta di antara 34 provinsi yang berada di bawah DKI Jakarta (Dinkes DIY, 2021).

Menurut teori, dengan adanya pertumbuhan ekonomi, maka bisa untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (Istiqamah, dkk. 2018). Namun, hal ini tidak berlaku di D.I. Yogyakarta dimana ketimpangan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemberian dana perimbangan dan pelaksanaan PAD dengan tujuan untuk menurunkan ketimpangan pendapatan masih belum bisa untuk mengatasi ketimpangan pendapatan di provinsi D.I. Yogyakarta. IPM D.I. Yogyakarta juga mempunyai nilai yang tinggi, tetapi ketimpangan pendapatan juga masih meningkat dari tahun ke tahun. Dari berbagai permasalahan diatas kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi D.I. Yogyakarta

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
5. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
6. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara bersama-sama terhadap ketimpangan pendapatan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Ketimpangan pendapatan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara bersama-sama terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1.4. Manfaat Penelitian

1. Dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan penulis terkait pengaruh desentralisasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan bagi berbagai pihak yang ingin meneliti lebih lanjut
3. Membantu merekomendasikan kebijakan bagi pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk penyelesaian masalah ketimpangan pendapatan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Kunenengan, dkk. (2023) mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan lima kabupaten/kota di Bolaang Mongondow provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2016-2020. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel yang berasal dari BPS Sulawesi Utara dengan periode tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan variabel independen pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan serta variabel dependennya ketimpangan pendapatan. Metode penelitian yang digunakan adalah *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil dari penelitian ini adalah variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan lima kabupaten/kota di Bolaang Mongondow provinsi Sulawesi Utara dan variabel kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan lima kabupaten/kota di Bolaang Mongondow provinsi Sulawesi Utara.

Wardhana dkk. (2023) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), infrastruktur jalan, *bold harmless*, dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tahun 2001-2010. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel yang berasal dari BPS dengan periode tahun 2001-2010. Penelitian ini menggunakan variabel independen Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), infrastruktur jalan, *bold harmless*, dan jumlah penduduk serta variabel dependennya ketimpangan pendapatan. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil dari penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU),

Dana Alokasi Khusus (DAK), infrastruktur jalan, *bold harmless*, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Jamiel, dkk. (2022) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Jawa Barat pada tahun 2013-2020. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel yang berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik Jawa Barat periode tahun 2013-2020. Penelitian ini menggunakan variabel independen Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta variabel dependennya ketimpangan pendapatan. Metode penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Hasil dari penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan provinsi Jawa Barat, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan provinsi provinsi Jawa Barat, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan provinsi Jawa Barat.

Yoertiara dan Feriyanto (2022) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap ketimpangan pendapatan 6 provinsi di pulau Jawa dalam periode 2012-2021. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel yang berasal dari Badan Pusat Statistika (BPS) dan Sistem Informasi dan Manajemen Data Dasar Regional (SIMREG) Bappenas periode tahun 2012-2021. Penelitian ini menggunakan variabel independen pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka serta variabel dependen ketimpangan pendapatan. Metode penelitian ini adalah regresi data panel. Hasil dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan

pendapatan, dan TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Muharam (2022) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Jumlah Penduduk dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Yogyakarta. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel yang berasal dari Badan Pusat Statistika (BPS) dengan periode tahun 2015-2020. Penelitian ini menggunakan variabel independen Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Jumlah Penduduk dan Kemiskinan serta variabel dependennya ketimpangan pendapatan. Metode penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda data panel. Hasil penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan serta pendidikan dan kemiskinan berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pendapatan di DIY.

Randa (2022) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan di 7 Kabupaten/Kota provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2011-2021. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel yang berasal dari Badan Pusat Statistika (BPS) dengan periode tahun 2011-2021. Penelitian ini menggunakan pertumbuhan ekonomi dan IPM sebagai variabel independennya serta ketimpangan pendapatan sebagai variabel dependennya. Metode penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap ketimpangan pendapatan serta IPM berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pendapatan di 7 Kabupaten/Kota provinsi Kepulauan Riau.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada jenis data yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan data panel, sedangkan penelitian ini menggunakan data *time series*. Variabel independen yang digunakan pada penelitian

sebelumnya pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. (Kunenengan, dkk. 2023), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), infrastruktur jalan, *bold harmless*, dan jumlah penduduk. (Wardhana, 2023), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Jamiel, dkk. 2022), Pertumbuhan ekonomi, IPM, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). (Yoertiara dan Feriyanto, 2022), pertumbuhan ekonomi, pendidikan, jumlah penduduk, dan kemiskinan (Muharam, 2022). Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). (Randa, 2022) Perbedaan pada waktu penelitian dari penelitian sebelumnya adalah tahun yang digunakan terkini, yaitu 2016-2020, 2001-2010, 2013-2020, 2012-2021, 2015-2020, 2011-2021. Pada penelitian ini menggunakan periode tahun 2003-2022. Perbedaan lainnya adalah metode yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya menggunakan metode OLS dan regresi data panel. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah *Error Correction Model* (ECM).

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Keterangan	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
1.	“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Lima Kabupaten/Kota di Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara” Kunenengan dkk (2023)	Variabel Dependen : • Ketimpangan Pendapatan Variabel Independen : • Pertumbuhan Ekonomi • Kemiskinan	<i>Ordinary Least Square</i> (OLS).	• Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan • Kemiskinan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan

No.	Keterangan	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
2.	“Dampak Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia” Wardhana dkk. (2023)	Variabel Dependen : • Ketimpangan Pendapatan Variabel Independen : • Dana Alokasi Umum (DAU) • Dana Alokasi Khusus (DAK) • Infrastruktur jalan • <i>Hold harmless</i> • Jumlah penduduk	Regresi data panel	• DAU, DAK, infrastruktur jalan, dan jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan • <i>Hold harmless</i> berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan

No.	Keterangan	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
3.	“Determinan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat” Jamiel dkk. (2022)	Variabel Dependen : • Ketimpangan Pendapatan Variabel Independen : • Pendapatan Asli Daerah • Dana Alokasi Umum • Dana Alokasi Khusus	Regresi data panel	• Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan • Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan

No.	Keterangan	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
4.	“Pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan provinsi-provinsi di pulau Jawa” Yoertiara dan Feriyanto (2022)	Variabel Dependen : • Ketimpangan pendapatan Variabel Independen : • Pertumbuhan ekonomi • IPM • Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Regresi data panel	• Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan • IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan • TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

No.	Keterangan	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
5.	“Analisis Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2020” Muharam (2022)	Variabel Dependen : • Ketimpangan Pendapatan Variabel Independen : • Pertumbuhan ekonomi • Pendidikan • Jumlah penduduk • Kemiskinan	Analisis regresi linier berganda data panel	• Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan • Pendidikan dan kemiskinan berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pendapatan di DIY
6.	“Dampak Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau” Fradya Randa (2022)	Variabel Dependen : • Ketimpangan Pendapatan Variabel Independen : • Pertumbuhan Ekonomi • Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Regresi data panel	• Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan • Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah distribusi yang tidak proporsional dari pendapatan nasional total di antara berbagai rumah tangga dalam negara. Dengan kata lain, ketimpangan pendapatan adalah perbedaan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat sehingga mengakibatkan perbedaan pendapatan yang lebih besar antar golongan dalam masyarakat tersebut Todaro (2011:254)

Tujuan dari distribusi pendapatan adalah sebagai berikut (Pratiwi, 2020):

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga kesejahteraan bisa tercapai
2. Memberikan hak dan keadilan bagi setiap warga suatu negara
3. Mengurangi terjadinya kriminalitas
4. Menumbuhkan solidaritas dan rasa sosial yang tinggi di masyarakat

Berikut faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan pendapatan di negara-negara sedang berkembang (Arsyad, 2010):

1. Tingginya pertumbuhan penduduk yang menyebabkan turunnya pendapatan perkapita
2. Adanya inflasi yang ditandai dengan pendapatan uang bertambah, tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertumbuhan produksi barang
3. Pembangunan daerah yang tidak merata
4. Banyak investasi pada proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*) sehingga persentase modal yang berasal dari tambahan harta bisa lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan dari bekerja sehingga berakibat pada bertambahnya pengangguran.
5. Mobilitas sosial yang rendah

6. Dilaksanakannya kebijakan industri substitusi impor yang berakibat pada kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha golongan kapitalis
7. Terjadinya nilai tukar yang memburuk bagi negara-negara berkembang ketika melakukan perdagangan dengan negara maju, hal ini disebabkan ketidakelastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang ekspor dari negara-negara sedang berkembang
8. Industri kerajinan rakyat memburuk. Contoh industri ini adalah pertukangan, rumah tangga, dan lain-lain.

2.2.1.1. Pengukuran Ketimpangan Pendapatan menurut *World Bank*

Menurut Bank Dunia dalam mengukur ketimpangan pendapatan dilakukan dengan cara menghitung persentase jumlah pendapatan masyarakat dari golongan yang berpendapatan rendah dibandingkan dengan jumlah seluruh pendapatan penduduk. Kriteria ini membentuk suatu bagian masyarakat yang diurutkan dari yang paling rendah ke tinggi, yang dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah proporsi yang diperoleh oleh 40 persen penduduk yang berada pada lapisan terendah
2. Jumlah proporsi yang diperoleh 40 persen penduduk yang berada pada lapisan sedang
3. Jumlah proporsi yang diperoleh 20 persen penduduk yang berada pada lapisan tinggi

Kriteria yang digunakan dalam menentukan kategori ketimpangan pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Apabila proporsi jumlah pendapatan masyarakat kategori 40 persen terhadap pendapatan penduduk mempunyai nilai kurang dari 12 persen, maka distribusi pendapatan termasuk dalam ketimpangan yang tinggi.

2. Apabila proporsi jumlah pendapatan masyarakat kategori 40 persen terhadap pendapatan penduduk mempunyai nilai pada rentang 12 – 17 persem, maka distribusi pendapatan termasuk dalam ketimpangan yang sedang.
3. Apabila proporsi jumlah pendapatan masyarakat kategori 40 persen terhadap pendapatan penduduk mempunyai nilai lebih besar dari 17 persen, maka distribusi pendapatan termasuk dalam ketimpangan yang rendah.

2.2.1.2. Rasio Gini

Ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat yang mempunyai kisaran angka 0 hingga 1 disebut rasio gini. Apabila nilai rasio gini semakin mendekati 1, maka ketimpangannya semakin tinggi. Apabila nilai rasio gini semakin mendekati 0, maka ketimpangannya semakin rendah. Pengukuran rasio gini yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) menggunakan pendekatan pengeluaran.

Rumus Gini Ratio:

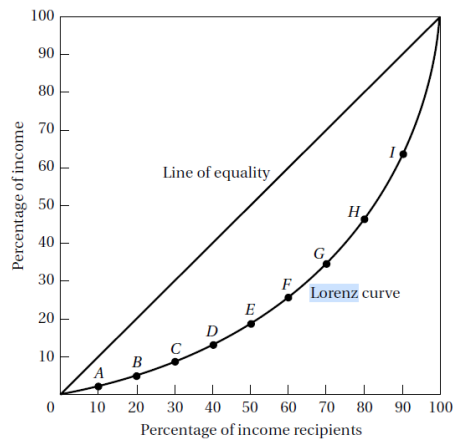
$$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$$

Ket : f_i = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i .

Y_i = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i .

2.2.1.3. Kurva Lorenz

Definisi kurva Lorenz adalah kurva yang menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase penduduk dan persentase pendapatan yang diterima pada kurun waktu tertentu (Bappeda DIY, 2020). Kurva ini terdapat di sebuah segi empat sama sisi dengan sisi tegak menggambarkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi dasarnya menggambarkan persentase kumulatif penduduk. Distribusi pendapatan nasional dikatakan semakin merata apabila kurva Lorenz semakin condong ke arah diagonal. Distribusi pendapatan nasional dikatakan semakin timpang atau tidak merata apabila kurva Lorenz semakin menjauhi diagonal (Subrata, 2018).



Gambar 2.1. Kurva Lorenz

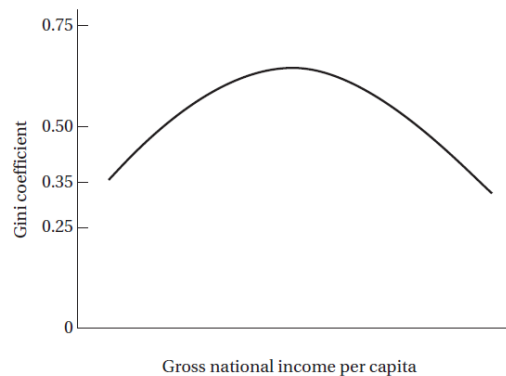
Sumber: Todaro (2011)

Semakin menjauh kurva Lorenz dari diagonal, maka menunjukkan derajat ketidakmerataan yang semakin tinggi. Kondisi yang paling ekstrim dari ketidakmerataan ini ketika seluruh pendapatan hanya dikuasai oleh satu orang yang ditunjukkan dengan berhimpitnya kurva Lorenz dengan sumbu horizontal bagian bawah dan sumbu vertikal bagian kanan.

2.2.1.4. Hipotesis Kuznets

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan ketimpangan distribusi pendapatan di antara penduduknya dijelaskan melalui hipotesis yang ditemukan oleh Kuznets yang bernama hipotesis Kuznets. Kuznets menggunakan data antarnegara (*crosssection*) dan data dari sejumlah survei atau observasi pada setiap negara dengan data dalam bentuk *time series*. Pada penelitian Kuznets ditemukan relasi antara ketimpangan pendapatan dengan tingkat pendapatan per kapita berbentuk huruf U terbalik (Gambar 2.2.). Di tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk (ketimpangan meningkat), tetapi pada tahap selanjutnya

distribusi pendapatan akan membaik (ketimpangan menurun).



Gambar 2.2. Kurva U-terbalik

Sumber : Todaro (2011)

Hipotesis Kuznets didasarkan kepada argumentasi teori dari Lewis terkait perpindahan penduduk dari pedesaan (sektor pertanian) ke perkotaan (sektor industri). Padatnya penduduk di pedesaan membuat tingkat upah di sektor pertanian sangat rendah (di perkotaan tingkat upah relatif tinggi karena jumlah penduduk yang tidak begitu padat dan tenaga kerjanya relatif sedikit) dan membuat suplai tenaga kerja dari sektor tersebut ke sektor industri tidak terbatas. Proses perpindahan tenaga kerja ini terus berlangsung hingga fase terakhir ketika mayoritas tenaga kerja yang berasal dari sektor pertanian sudah diserap oleh sektor industri sehingga perbedaan pendapatan perkapita antara di pedesaan dengan perkotaan menjadi kecil atau bahkan tidak ada lagi (Laksani, 2010).

2.2.2. Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik

Indonesia. Menurut Sinaga (2023) sebagai akibat penyerahan sebagian tugas pemerintahan dan wewenang oleh pusat kepada Pemda, maka pemerintah pusat juga harus melimpahkan dana kepada daerah agar bisa mendanai urusan pemerintahan, memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, menjalankan roda perekonomian, serta mengatur dan mengelola rumah tangga pemerintah daerah, hal ini disebut dengan desentralisasi fiskal. Menurut Kemenkeu desentralisasi fiskal adalah proses distribusi dari pemerintahan yang lebih tinggi terhadap pemerintahan yang lebih rendah dengan tujuan mendukung fungsi atau tugas pemerintahan serta pelayanan publik sesuai dengan kewenangan bidang pemerintahan yang diberikan.

Desentralisasi fiskal resmi diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001 yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Hingga saat ini, sudah terdapat beberapa revisi pada kedua peraturan tersebut. Terakhir ada UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Desentralisasi fiskal mempunyai tujuan untuk menampung aspirasi; meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, serta akuntabilitas pemerintah daerah; mengurangi ketimpangan; hingga memastikan pelayanan bisa tepat sasaran sehingga kesejahteraan bisa terwujud (Nurhemi, 2015).

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.

2.2.2.1. Dana Alokasi Umum

Menurut UU RI No. 33 Tahun 2004 pengertian Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat umum (block grants) dan mempunyai fungsi sebagai instrumen penyeimbang fiskal antar daerah (Alpi & Sirait, 2022)

Di dalam UU No. 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan APBN. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Pengalokasian Dana Alokasi Umum dilakukan berdasarkan kebutuhan setiap daerah. Luas wilayah, jumlah penduduk, keadaan geografis, dan tingkat pendapatan masyarakat menjadi tolak ukur dalam kebutuhan daerah.

Pelaksanaan dan pengalokasian Dana Alokasi Umum diatur berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan dan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dalam PP Nomor 55 Tahun 2005, dijelaskan bahwa:

- a. Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang- kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto.
- c. Proporsi Dana Alokasi Umum antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Pada penghitungan alokasi dasar didasarkan pada data jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) serta besaran belanja gaji PNSD dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan penggajian (Bapenda, 2014).

Formulasi DAU adalah sebagai berikut:

$$DAU = AD + CF$$

Keterangan :

AD : Gaji pns daerah

CF : Kebutuhan fiskal – kapasitas fiskal

2.2.2.2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut UU. No. 33 Tahun 2004 pengertian Dana Alokasi Khusus yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Putra & Ulupui (2015) penyaluran DAK dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Kegiatan-kegiatan yang dilarang untuk didanai dengan DAK, yaitu administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.

Penghitungan alokasi DAK dilakukan oleh Menteri Keuangan, setelah menerima usulan kegiatan dari Menteri Teknis. Penghitungan alokasi DAK melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; b Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Daerah Tertentu merupakan daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

DAK sudah mengalami perkembangan sehingga bidang-bidang yang didanai turut mengalami penambahan. Pengalokasian DAK di tahun 2005 digunakan untuk membiayai kegiatan pada delapan bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, air bersih, dan pertanian. Pada tahun

2012 perkembangan terakhir terjadi, bidang-bidang yang didanai DAK menjadi 19 bidang sebagai berikut:

19 Bidang yang Didanai Dana Alokasi Khusus (DAK)	
1. Pendidikan	2. Keluarga Berencana
3. Kesehatan	4. Kehutanan
5. Infrastruktur Jalan	6. Perdagangan
7. Infrastruktur Irigasi	8. Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal
9. Infrastruktur Air Minum	10. Listrik Pedesaan
11. Infrastruktur Sanitasi	12. Perumahan dan Pemukiman
13. Prasarana Pemerintah	14. Transportasi Pedesaan
15. Kelautan dan Perikanan	16. Sarana dan Prasaran Kawasan Perbatasan
17. Pertanian	18. Keselamatan Transportasi Darat
19. Lingkungan Hidup	

Perhitungan Dana Alokasi Khusus berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan menggunakan rumus berikut:

$$DAK = [PU \text{ APBD} - \text{Belanja Pegawai Daerah}]$$

Keterangan :

DAK : Dana Alokasi Khusus

PU APBD : Penerimaan Umum APBD (PAD + DAU + DBH)

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

DBH : Dana Bagi Hasil

Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK yang diterimanya. Dana Pendamping dianggarkan dalam APBD. Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping. DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

2.2.2.3. Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pada pasal 6 adalah Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan lain-lain. Pendapatan daerah yang sah, yaitu pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri dari sumbangan pemerintah, sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan pendapatan lain-lain yang sah, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Menurut UU No. 34 Tahun 2000 terkait perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 terkait pajak daerah dan retribusi daerah definisi pajak daerah adalah “pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah”.

2. Retribusi Daerah

Salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat merupakan pengertian dari retribusi daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud retribusi pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan

BUMD didirikan dengan tujuan penciptaan lapangan kerja atau mendukung pembangunan ekonomi daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dan termasuk salah satu sumber penerimaan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan menurut Pasal 6 ayat 3 Undang-undang Nomor 33 meliputi (a) bagian laba perusahaan milik daerah, (b) bagian laba lembaga keuangan bank, (c) bagian laba lembaga keuangan non bank, dan (d) bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 6 ayat 3 Lain-lain PAD yang sah meliputi: a) bagian laba perusahaan milik daerah, (b) bagian laba lembaga keuangan bank, (c) bagian laba lembaga keuangan non bank, dan (d) bagian laba atas pernyataan modal/investasi

2.2.3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah tambahan pendapatan penduduk pada periode waktu tertentu. Pendapatan masyarakat berasal dari proses pemakaian faktor-faktor produksi untuk menciptakan barang dan jasa sehingga terbentuk suatu aliran balas jasa pada faktor produksi masyarakat (Subrata, 2018). Menurut BPS Kaltim, salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah pada periode waktu tertentu

bisa dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang perhitungannya berdasar atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku mendeskripsikan nilai tambah dalam barang dan jasa yang dihitung sesuai dengan harga pada periode saat ini, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menjelaskan nilai tambah pada barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku di tahun tertentu sebagai tahun dasar. Pada perhitungan PDRB terdapat tiga pendekatan, yaitu produksi (lapangan usaha), pendapatan, dan pengeluaran (penggunaan). Secara teori penghitungan dengan menggunakan tiga pendekatan itu akan menghasilkan PDB yang sama (BPS Musi Rawas, 2021).

Menurut (Febriansah, 2019) teori-teori pada pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut:

a. Mazhab Klasik

Menurut Adam Smith inti ada dua aspek utama yang harus dipenuhi pada inti dalam proses pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk

1. Pertumbuhan Output Total

Menurut Adam Smith pada sistem produksi suatu negara terdapat unsur sebagai berikut:

- a. Sumber daya alam yang ada, hal ini bisa diketahui dari ketersediaan tanah. Apabila sumber daya alam sudah digunakan secara optimal, maka pertumbuhan output akan berhenti.
- b. Sumber daya manusia yang bisa diketahui dari jumlah penduduk. Salah satu faktor kunci ketika ingin meningkatkan produktivitas tenaga kerja adalah dengan spesialisasi. Spesialisasi melahirkan kemahiran, efisiensi, serta memajukan teknologi sehingga produktivitas akan meningkat.
- c. Akumulasi modal, menurut Adam Smith salah satu unsur penting dalam melakukan pembangunan ekonomi adalah stok modal. Jumlah

tabungan masyarakat akan menentukan stok modal. Smith menyatakan bahwa yang memiliki kemampuan menabung hanya para tuan tanah serta pengusaha yang memiliki kemampuan untuk menabung karena mereka adalah kelompok “pemilik modal”.

2. Pertumbuhan Penduduk

Menurut Smith pertumbuhan ekonomi bisa didorong oleh adanya pertumbuhan penduduk. Apabila penduduk meningkat maka, bisa untuk memperluas pasar sehingga akan mendorong tingkat spesialisasi pada perekonomian. Spesialisasi yang meningkat akan mendorong produktivitas tenaga kerja sehingga teknologi juga akan mengalami kemajuan

b. Mazhab Keynesian

Teori Keynes yang sudah diperbarui oleh Roy Harrod dan Evsey Domar menganalisis syarat-syarat yang diperlukan perekonomian dalam jangka panjang untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Teori ini lebih sering disebut sebagai teori Harrod-Domar yang menjadi pondasi dalam mazhab Keynesian. Pada teori Harrod-Domar hal penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi adalah pembentukan modal. Teori ini menjelaskan bahwa apabila pada perekonomian berikutnya ingin mempunyai kemampuan yang lebih tinggi ketika memproduksi barang dan jasa, maka pada periode tersebut diperlukan pembentukan modal. Pada teori Harrod-Domar terdapat asumsi-asumsi adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan perekonomian penuh serta faktor produksi juga digunakan dengan penuh
- b. Sektor rumah tangga dan sektor perusahaan adalah dua sektor yang menjadi bagian dari perekonomian ini.
- c. Jumlah pendapatan nasional proposional dengan jumlah tabungan masyarakat

- d. Kecenderungan menabung (*Marginal Propensity to Save* = MPS), rasio antara modal-output (*Capital-Output Ratio* = COR) serta rasio pertambahan modal output (*Incremental Capital-Output Ratio* = ICOR) mempunyai besaran yang tetap.

c. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Pada tahun 1950-an teori pertumbuhan neo klasik mulai berkembang. Kerangka analisis yang dibuat oleh Robert Solow dan Trevor Swan menjadi acuan pada teori ini. Menurut Solow dan Swan ketersediaan faktor produksi, seperti penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal, dan tingkat kemajuan teknologi menjadi hal-hal yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian berada pada tingkat pengerjaan yang penuh (full employment) dan tingkat pemanfaatan penuh dari faktor produksi menjadi dasar dari teori Solow dan Swan. Hal ini mempunyai arti bahwa perekonomian akan terus mengalami perkembangan dan seluruhnya bergantung pada peningkatan penduduk, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi.

d. Teori Pertumbuhan Endogen

Buku buatan Michael Romer *Endogenous Technological Change and The Origins of Endogenous Growth* pada tahun 1994 menjadi awal dalam menggagas teori pertumbuhan endogen. Pada teori ini mengidentifikasi bahwa faktor dari dalam (endogenous) dan modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi serta memiliki arti yang lebih luas dan mengandung makna modal insani (human capital). Faktor teknologi memiliki peranan penting pada model ini, tetapi tidak menjadi komponen pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan dari meningkatnya kualitas saja, tetapi juga lebih pada meningkatnya kualitas sesuai dengan isyarat paradigma baru dalam pembangunan. Peningkatan laju pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita dari tahun ke tahun menjadi indikator dalam sisi

kuantitas pertumbuhan ekonomi. Pemerataan distribusi pendapatan serta peningkatan kualitas hidup menjadi indikator dalam sisi kualitas pertumbuhan ekonomi (Sobari, 2009).

2.2.4. Indeks Pembangunan Manusia

United Nations Development Programme (UNDP) pertama kali mempublikasikan konsep IPM melalui Human Development Report. Pembangunan manusia mempunyai pengertian “a process of enlarging peoples choice” yang memiliki arti suatu proses untuk meningkatkan aspek kehidupan manusia. Pada IPM terdapat tiga aspek penting, yaitu berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, serta untuk memperoleh standar hidup yang layak. (Naufal, 2023).

Dalam proses pembangunan, sumber daya manusia mempunyai peranan yang penting. Apabila kualitas sumber daya manusia (SDM) semakin tinggi, maka akan mendorong kemajuan suatu negara atau daerah. Indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Aspek yang menjadi fokus perhatian dalam peningkatan IPM adalah peningkatan standar pendidikan, derajat kesehatan, dan mutu ekonomi keluarga. Ketiga hal tersebut saling memengaruhi satu sama lain. Oleh sebab itu, pada konteks pembangunan SDM, ketiga hal tersebut harus diperhatikan secara utuh (Hardjanto, 2017).

Komponen Indeks Pembangunan Manusia ada tiga, yaitu:

1. Mempunyai Umur Panjang

Angka Harapan Hidup (AHH) mewakili umur panjang dan hidup sehat atau sekarang disebut dengan umur hidup. Untuk melihat derajat kesehatan penduduk menggunakan indikator ini. Menurut Statistik Indonesia, angka harapan hidup mempunyai definisi rata-rata tahun hidup yang akan dijalani bayi yang baru lahir di tahun tertentu (Sugiantari & Budiantari, 2013). Penduduk merupakan aset bangsa. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan penduduk secara kualitas maupun kuantitas. Kesejahteraan rakyat dan keberhasilan dari program-program yang sudah

dibuat pemerintah agar derajat kehidupan manusia bisa meningkat tercermin dari kualitas hidup suatu negara atau wilayah. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah salah satu unsur di dalam kualitas hidup (Ardianti *et al.*, 2015).

2. Tingkat Pendidikan

Untuk mengukur tingkat pendidikan menggunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal. Sedangkan, angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat menulis dan membaca huruf latin dan atau huruf lainnya. Proses perhitungannya dilakukan dengan cara kedua indikator tersebut digabung setelah masing-masing diberikan bobot. Untuk bobot rata-rata lama sekolah sebesar sepertiga sedangkan, melek huruf sebesar dua per tiga (BPS Bandung Barat, 2013)

3. Standar Hidup

Ukuran standar hidup menurut Todaro (2011) adalah pendapatan per kapita riil dan disesuaikan dengan paritas daya beli mata uang masing-masing negara yang mempunyai indikasi pada biaya hidup setiap negara. Melalui hal tersebut bisa diketahui standar hidup suatu negara. Negara dikatakan mempunyai standar hidup tinggi apabila mempunyai pendapatan dan kualitas sistem pendidikan tinggi, ketimpangan pendapatan rendah, dan kesehatan masyarakat mempunyai kualitas yang baik. Hal sebaliknya, negara dikatakan mempunyai standar hidup rendah apabila ketimpangan pendapatan tinggi serta kualitas kesehatan dan pendidikan rendah. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto Riil yang sudah disesuaikan, sedangkan BPS menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil.

2.3. Hubungan Antar Variabel

2.3.1. Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Ketimpangan Pendapatan

Dana Alokasi Umum adalah dana yang dilimpahkan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah dengan tujuan pemeratakan keuangan antar daerah agar kebutuhan daerahnya bisa terdani. DAU bisa berdampak pada penurunan ketimpangan pendapatan dengan asumsi alokasi DAU lebih banyak kepada belanja pembangunan (infrastruktur) daripada belanja pegawai. DAU yang dialokasikan untuk belanja pembangunan bisa untuk meningkatkan pendapatan suatu daerah agar kemampuan keuangan antar daerah bisa lebih merata sehingga ketimpangan keuangan antar daerah berkurang. Apabila kemampuan keuangan antardaerah berkurang, maka ketimpangan pendapatan bisa berkurang. (Putri & Natha, 2014)

Dengan demikian, Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardhana, dkk (2023) yang menyatakan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan

2.3.2. Hubungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Ketimpangan Pendapatan

Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai pengertian dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke suatu daerah dengan tujuan membantu membiayai kegiatan khusus yang termasuk urusan pemerintahan daerah serta sesuai dengan prioritas nasional (Bappenas, 2020). DAK dari pemerintah pusat digunakan untuk pembangunan serta perbaikan sarana dan prasarana yang bisa membantu mempermudah proses produksi atau mobilitas sehingga meningkatkan hasil produksi. Apabila hasil produksi meningkat maka, pendapatan masyarakat akan meningkat juga sehingga bisa mengurangi ketimpangan pendapatan.

Dengan demikian, Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardhana, dkk

(2023) dan Jamiel dkk. (2022) yang menyatakan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan

2.3.3. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Ketimpangan Pendapatan

Menurut Abdul Halim (2007) semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah disebut dengan PAD. PAD juga menjadi ukuran bagi potensi perekonomian suatu daerah. Sektor pendapatan daerah merupakan sektor yang krusial sebab dari sektor ini diketahui sejauh mana suatu wilayah bisa untuk mendanai kegiatan serta pembangunan pemerintah. Kemandirian suatu daerah bisa dilihat dari semakin tingginya PAD. Apabila PAD semakin tinggi maka, menunjukkan semakin baik kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunan (Sulistyo, 2017). Hal ini berarti semakin besar PAD, maka ketimpangan pendapatan akan semakin menurun.

Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamiel dkk. (2022) yang menyatakan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan

2.3.4. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Pendapatan

Definisi pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah produksi pada suatu negara di periode waktu tertentu. Apabila jumlah produksi maupun output nasional suatu negara meningkat daripada tahun sebelumnya, maka bisa dikatakan saat itu pertumbuhan ekonomi sedang tinggi. Pertumbuhan ekonomi ini mempunyai dampak, yaitu kenaikan proses pembangunan dengan adanya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Hal ini kemudian akan memunculkan dugaan peningkatan pertumbuhan ekonomi bisa menurunkan ketimpangan pendapatan (Ridho, 2018)

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kunenengan,

dkk (2023) yang menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan

2.3.5. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Ketimpangan Pendapatan

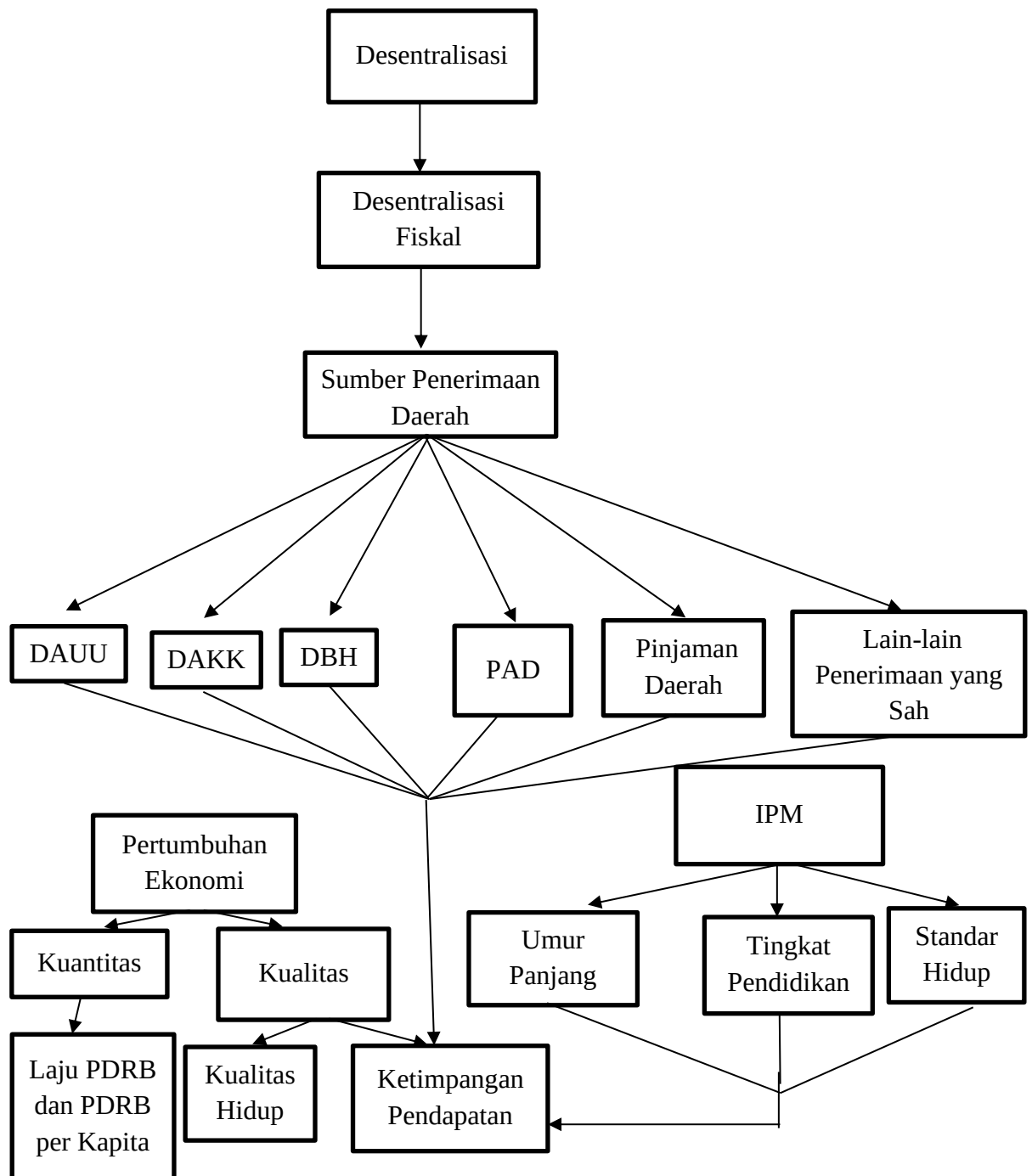
Indikator ketika ingin melihat kualitas pembangunan ekonomi suatu daerah adalah dengan menggunakan IPM. Indeks pembangunan manusia terdiri dari tiga unsur, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Ketiga unsur tersebut saling memengaruhi satu dengan yang lain. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki seseorang, maka semakin tinggi pula kesempatan orang tersebut memperoleh pekerjaan sehingga mempunyai pendapatan. Kontribusi untuk memaksimalkan angkatan kerja akan semakin baik apabila tingkat kesehatan masyarakat semakin tinggi sebab kesehatan yang baik bisa menjadikan seseorang beraktivitas dengan maksimal. Apabila semua unsur pada IPM bisa untuk ditingkatkan, maka produktivitas tenaga kerja bisa lebih baik sehingga berpeluang untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Apabila pendapatan perkapita meningkat maka, pemerataan pendapatan di suatu wilayah tersebut lebih baik sehingga menurunkan ketimpangan pendapatan.

Dengan demikian, IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fradya Randa (2022) yang menyatakan bahwa variabel IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan

2.4. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori diatas kemudian dibuat kerangka pemikiran untuk penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.3. Bagan Kerangka Pemikiran



2.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan kajian pustaka yang sudah dijabarkan diatas, maka bisa diambil hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Diduga Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan
2. Diduga Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan
3. Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan
4. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan
5. Diduga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan
6. Diduga Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh secara bersama-sama terhadap ketimpangan pendapatan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan, yaitu data antar waktu (*time-series*) provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan periode waktu 2003-2022. Untuk sumber data penelitian berasal Badan Pusat Statistik (BPS). *Gini ratio* adalah variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini dan variabel independen Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3.2. Definisi Operasional Variabel

Terdapat dua jenis variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

a. Variabel dependen

Pada penelitian ini variabel Y yang digunakan adalah *gini ratio*. *Gini ratio* adalah indeks yang menggambarkan pemerataan dan ketimpangan seluruhnya, mulai dari pendapatan hingga distribusi (Pemda DIY, 2019). Data yang digunakan merupakan ratio gini provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2003-2022. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dengan satuan persen.

b. Variabel independen

- i. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 pengertian DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (PPID Sumbar, 2020). Data yang digunakan Dana Alokasi Umum provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode

tahun 2003-2022. Badan Pusat Statistik (BPS) DIY merupakan sumber dari data yang digunakan Indonesia dengan satuan ribu rupiah.

- ii. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 pengertian Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (PPID Sumbar, 2020). Data yang digunakan Dana Alokasi Khusus provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2003-2022. Badan Pusat Statistik (BPS) DIY merupakan sumber dari data yang digunakan Indonesia dengan satuan ribu rupiah.
- iii. Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (BPKAD Kuningan, 2023). Data yang digunakan Pendapatan Asli Daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2003-2022. Badan Pusat Statistik (BPS) DIY merupakan sumber dari data yang digunakan ia dengan satuan ribu rupiah.
- iv. Pertumbuhan ekonomi, yaitu meningkatnya nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu (Hartati, 2021). Data yang digunakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan harga konstan 2010 provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2003-2022. Badan Pusat Statistik (BPS) DIY merupakan sumber dari data yang digunakan dengan satuan persen.

- v. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting dalam upaya pencapaian kualitas pembangunan hidup manusia (BPS Sidoarjo, 2016). Data yang digunakan Indeks Pembangunan Manusia provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2003-2022. Badan Pusat Statistik (BPS) DIY merupakan sumber dari data yang digunakan dengan satuan persen.

3.3. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah statistik deskriptif dan analisis kuantitatif. Dilakukannya metode statistik deskriptif pada model ini adalah untuk menjelaskan objek penelitian dilihat dari pengaruh desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan. Digunakan analisis data kuantitas dengan *Error Correcton Model* (ECM) untuk memperkuat hasil uji dari statistik deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data time series sehingga harus dilakukan uji stasioneritas terlebih dahulu sebelum melakukan estimasi. Tujuan dari pengujian ini adalah menghindari terjadinya regresi lancung (*spurious regression*). Pengertian regresi lancung adalah kondisi dimana nilai koefisien determinasi dari hasil regresi mempunyai nilai tinggi, tetapi sebenarnya hal ini tidak mempunyai makna pada hubungan antar variabel (Gujarati, 2010).

Pemodelan koreksi kesalahan bisa digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan antar variabel yang bersifat stationary. Pengujian kesalahan dinyatakan valid apabila didapt kointegrasi pada variabel yang non-stationary. Syarat ini sudah dijelaskan Engel—Granger (Ariefianto, 2012). *Error Correction Model* (ECM) adalah salah satu model estimasi yang bertujuan untuk menguji persamaan regresi pada variabel-variabel secara individual yang tidak stasioner agar pada jangka panjang bisa kembali pada equilibrium (Ajija, dkk. 2011).

3.4. Pendekatan Model Koreksi Kesalahan

Pada penelitian ini pendekatan model koreksi kesalahan yang digunakan adalah *Error Correction Model* (ECM). Penjelasan model ECM adalah sebagai berikut:

3.4.1. Uji Akar Unit

Uji stasioneritas harus dilakukan apabila ingin melakukan uji pada time series. Manfaat dari uji data stasioner ini adalah untuk mendapatkan nilai rata-rata yang stabil dan random error sama dengan nol sehingga pada model ini memiliki kemampuan prediksi yang baik ketika menghindari data lang lancung (*spurious regression*). Regresi hasil yang berasal dari data yang menunjukkan determinasi R^2 tinggi, tetapi sebenarnya tidak ada arti pada hubungan antar variabel (Gujarati, 2004).

Pengujian formal yang dilakukan oleh David Dickey dan Wayne Fuller disebut dengan uji akar unit. Tujuan dari pengujian akar unit ini untuk mengetahui apakah data yang digunakan pada penelitian sudah stasioner atau tidak. Jika data tersebut tidak mempunyai akar atau unit maka, data dikatakan stasioner. Hal sebaliknya, apabila data tersebut mempunyai akar atau unit maka, data dikatakan tidak stasioner. Data yang bersifat stasioner berarti data yang menunjukkan karakteristik rata-rata dan varian yang bersifat konstan serta nilai autokorelasi tidak terikat titik waktu (*time invariant*) (Ariefianto, 2012).

3.4.2. Uji Derajat Integrasi

Pengujian derajat integrasi adalah uji stasioneritas dengan menggunakan *unit root test* pada tingkat *difference* apabila pada tingkat level menunjukkan bahwa data tidak stasioner, maka bisa dilanjutkan uji stasioneritas pada tingkat *difference*. Definisi pengujian derajat integrasi adalah uji stasioneritas menggunakan *unit root test*. Apabila pada tingkat level data yang diuji belum stasioner, maka solusinya adalah dengan melakukan diferensiasi pada tingkat *first difference* dan seterusnya (Kuncoro, 2011).

3.4.3. Uji Kointegrasi

Uji untuk mendeteksi kestabilan antara dua variabel atau lebih dalam hubungan jangka panjangnya disebut uji kointegrasi. Adanya hubungan jangka panjang pada variabel-variabel tersebut apabila diantara variabel-variabel yang diteliti terdapat kointegrasi. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui pada derajat integrasi ke berapa data yang digunakan tersebut akan stasioner (Basuki & Prawoto, 2016).

Jika residu dari tingkat regresi stasioner maka, terdapat kointegrasi dalam variabel-variabelnya pada data time series sehingga regresi akan menunjukkan estimasi yang tepat dalam jangka panjang. Uji Johansen dan uji Engle-Granger bisa dilakukan ketika ingin melakukan pengujian kointegrasi. Pengujian pada metode Engle-Granger ini menjadikan hasil dari regresi dengan metode *ordinary least square* sebagai sumber analisis hasil penelitiannya (Rosadi, 2012).

Hipotesis pada uji kointergasi adalah sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat kointegrasi

H_a : Terdapat kointegrasi

Berikut adalah bentuk dari hasil regresi jangka panjang:

$$GR = C_0 + \alpha_1 DAU + \alpha_2 DAK + \alpha_3 PAD + \alpha_4 GROWTH + \alpha_5 IPM + RESID01_t$$

Keterangan:

GR = *Gini Ratio* (%)

DAU = Dana Alokasi Umum (Ribuan Rupiah)

DAK = Dana Alokasi Khusus (Ribuan Rupiah)

PAD = Pendapatan Asli Daerah (Ribuan Rupiah)

Growth = Pertumbuhan Ekonomi (%)

IPM = Indeks Pembangunan Manusia (%)

3.4.4. Uji *Error Correction Model* (ECM)

Salah satu model regresi dengan tujuan mengidentifikasi persamaan regresi pada variabel-variabel secara individual yang tidak stasioner agar pada jangka panjang kembali pada equilibriumnya dengan aturan variabel-variabel tersebut harus terkointegrasi antar variabel-variabel disebut dengan ECM (Ajija, dkk. 2011). Fungsi dari ECM adalah untuk mengoreksi hubungan jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang. Uji ECM dilakukan apabila semua variabel lolos di uji kointegrasi. Residual jangka panjang ECM akan membentuk model ECM itu sendiri. Fungsi residual jangka panjang tersebut adalah mengoreksi kesalahan *Error Correction Term* (ECT) yang mempunyai pengaruh pada persamaan jangka pendek. Tujuan dari pemodelan ECM adalah untuk mengidentifikasi hubungan jangka panjang dan jangka pendek yang terjadi disebabkan adanya kointegrasi antar variabel penelitian (Basuki & Prawoto, 2016).

Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah *Gini Ratio* sedangkan, variabel independennya adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Persamaan model ECM dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$DGR = \beta_0 + \beta_1 DDAU + \beta_2 DDAK + \beta_3 DPAD + \beta_4 DGROWTH + \beta_5 DIPM + RESID01_{t-1}$$

Keterangan :

DGR = Perubahan *Gini Ratio*

DDAU = Perubahan Dana Alokasi Umum

DDAK = Perubahan Dana Alokasi Khusus

DPAD = Perubahan Pendapatan Asli Daerah

DGROWTH = Perubahan Pertumbuhan Ekonomi

DIPM = Perubahan Indeks Pembangunan Manusia

$RESID01_{t-1}$ = residual persamaan atau *Error Correction Model*

Apabila variabel-variabel yang terkointegrasi didukung oleh nilai koefisien ECT yang signifikan dan negatif, maka model ECM bisa dikatakan valid. Model ECM tidak bisa digunakan jika koefisien ECT berpengaruh positif sehingga variabel-variabel yang digunakan akan semakin menjauh dari keseimbangan jangka panjang (Rahutami, 2012).

3.5. Uji Asumsi Klasik

Model regresi berganda adalah suatu model yang terdiri dari variabel independen yang sudah diregres. Tujuan dilakukannya uji asumsi klasik ini agar bisa mengetahui apakah pada model regresi tersebut terdapat masalah atau tidak untuk menemui kaidah *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE). Data yang digunakan ini juga harus terbebas dari beberapa asumsi, yaitu homoskedastis, *non-autocorrelation*, dan non-multikolinearitas. (Ajija, dkk. 2011).

3.5.1. Uji Multikolinieritas

Adanya hubungan linier yang sempurna atau pati diantara beberapa atau sluruh varuabel yang menjelaskan dari variabel regresi merupakan pengertian dari multikolinearitas. Untuk melihat ada tidaknya multikolinearitas bisa diketahui dari koefisien korelasi setiap variabel independen. Apabila nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,8 maka terdapat masalah multikolinearitas, tetapi apabila probabilitasnya lebih kecil dari 0,8 maka tidak terdapat masalah multikolinearitas (Gujarati, 2010).

3.5.2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastis adalah keadaan ketika semua gangguan dalam fungsi regresi populasi tidak mempunyai varian yang sama. Berikut langkah-langkah dalam melakukan uji heteroskedastis (Ajija, dkk. 2011) :

- a. Dari hasil estimasi regresi kemudian dibuat pola residual. Dikatakan tidak ada heteroskedastis apabila residual bergerak konstan. Hal sebaliknya, dikatakan terdapat heteroskedastik apabila residual membentuk pola tertentu.
- b. Dilakukan uji *White Heteroskedasticity* pada eviews untuk membuktikan dugaan terdapat heteroskedastisitas. Kemudian melihat nilai Obs*R-squared. Dikatakan terjadi heteroskedastis apabila nilainya lebih kecil dari X^2 tabel. Hal sebaliknya juga berlaku, dikatakan tidak terjadi heteroskedastis apabila nilainya lebih besar dari X^2 tabel.

3.5.3. Uji Autokorelasi

Salah satu uji untuk mengetahui terdapat atau tidak terhadap hubungan antar variabel-variabel independen yang diuji adalah dengan menggunakan uji autokorelasi. Variabel dikatakan terjadi autokorelasi apabila terjadi korelasi. Uji *Lagrange Multiplier* bisa digunakan untuk uji autokorelasi. Probability Chi-Squares bisa dilihat dengan menggunakan pengujian ini. (Arificanto, 2012).

3.5.4. Uji Linieritas

Uji linieritas adalah suatu uji yang dilakukan untuk melihat sudah benar atau tidak spesifikasi model yang digunakan. Uji Ramsey (RESET) dilakukan untuk mengetahui data yang digunakan sudah linier atau belum. Uji Ramsey (RESET) adalah uji yang dikembangkan oleh Ramsey dengan cara mengembangkan uji secara umum kesalahan spesifikasi atau dikenal dengan uji kesalahan spesifikasi regresi *Regression Specification Error Test* (RESET) (Widarjono, 2018).

3.6. Pengujian Hipotesis

3.6.1. Koefisien Determinasi

Untuk melihat seberapa baik garis regresi bisa menggunakan uji koefisien determinasi. Uji ini bermanfaat untuk memperlihatkan adanya kecocokan dengan data. Garis regresi dikatakan semakin baik apabila angkanya mendekati angka 1 sebab bisa menjelaskan data aktualnya. Hal sebaliknya berlaku, garis regresi dikatakan tidak baik apabila angkanya menjauhi angka 1 atau mendekati angka 0 (Widarjono, 2018).

3.6.2. Uji F Statistik

Uji F adalah pengujian yang bertujuan membuktikan apakah seluruh variabel independen secara serentak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen serta modelnya secara layak bisa digunakan atau tidak. Cara untuk mengetahui hal tersebut adalah dengan melihat hubungan nilai F hitung dengan F kritisnya. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Apabila nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak (Sugiyono, 2019). Berikut hipotesis penelitian dari uji F:

H_0 : Variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

H_a : Variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

3.6.3. Uji T Statistik

Uji T statistik digunakan untuk mengetahui terdapat atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Cara untuk mengetahui hal tersebut bisa dilakukan dengan melihat hubungan t hitung dengan t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel atau probabilitas kurang dari α maka, menolak H_0 dan menerima H_a sehingga hasilnya berpengaruh secara signifikan

(secara individu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen). Apabila nilai t hitung lebih kecil dari t tabel atau probabilitas lebih besar dari α maka, menerima H_0 dan menolak H_a sehingga hasilnya tidak berpengaruh secara signifikan (secara individu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen) (Gujarati, 1995)

Pengujian statistik t atau t -test bisa dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan uji hipotesis ini dilakukan menggunakan kriteria sebagai berikut (Ronald & Raymond, 1995):

1. Apabila nilai probabilitas $> 0,05$ maka, hipotesis nol (H_0) gagal ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Hal ini berarti variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Hal ini berarti variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berikut hipotesis penelitian dari uji t :

H_0 : Variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

H_a : Variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data Penelitian

Terdapat dua jenis data variabel pada penelitian ini, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang digunakan adalah data Gini Ratio, sementara variabel independennya adalah data Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dilakukan identifikasi data dengan menggunakan statistik sebelum melakukan pengujian dengan metode ECM agar setiap karakteristik variabel dapat terlihat dengan jelas dan baik.

Tabel 4.1. Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Standard Deviation	Maximum	Minimum
GR	20	0.420800	0.023391	0.459	0.376
DAU	20	7.94E+08	4.05E+08	1.36E+09	2.02E+08
DAK	20	3.75E+08	4.74E+08	1.32E+09	5500000
PAD	20	1.16E+09	6.83E+08	2.08E+09	34741000
Growth	20	4.705500	1.845260	6.590000	-2.670000
IPM	20	76.70500	2.713928	80.64000	71.50000

Sumber : Hasil Olah Data dengan Eviews12

Berdasarkan tabel 4. 1., jumlah observasi data yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 20. Penjelasan terkait setiap variabel dependen dan independen, adalah sebagai berikut:

Mean untuk variabel GR sebesar 0.420800, DAU sebesar 7.94E+08, DAK sebesar 3.75E+08, variabel PAD sebesar 1.16E+09, variabel growth sebesar 4.705500, variabel IPM sebesar 76.70500. Standar deviasi untuk variabel GR sebesar 0.023391,

DAU sebesar 4.05E+08, DAK sebesar 4.74E+08, PAD sebesar 6.83E+08, growth sebesar 1.845260, dan IPM sebesar 2.713928. Nilai maximum untuk variabel GR sebesar 0.459, DAU sebesar 1.36E+09, DAK sebesar 1.32E+09, PAD sebesar 2.08E+09, growth sebesar 6.590000, dan IPM sebesar 80.64000. Nilai minimum untuk variabel GR sebesar 0.376, DAU sebesar 2.02E+08, DAK sebesar 5500000, PAD sebesar 34741000, growth sebesar -2.670000, dan IPM sebesar 71.50000.

4.2. Hasil Analisis

4.2.1. Uji Stasioner Data (*Unit Root*)

Akhir-akhir ini, para ahli peneliti sering menggunakan tes akar unit untuk menguji stasioneritas data. Tes ini mengaplikasikan Augmented Dicky Fuller yang diperkenalkan oleh Dickey Fuller pada tahun 1979. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

Hipotesis: $H_0: \phi = 0$, (data tidak bersifat stasioner)

$H_1: \phi < 0$, (data bersifat stasioner)

Untuk mengetahui tingkat stasioneritas variabel, tes akar unit dapat dilakukan pada tingkat level sebagai berikut:

Tabel 4.2. Hasil Uji Stasioner Data

Variabel	Tingkat Level		Tingkat 1st Difference	
	Prob	Keterangan	Prob	Keterangan
Gini Ratio	0.8466	Tidak Stasioner	0.0035	Stasioner
PAD	0.9719	Tidak Stasioner	0.0028	Stasioner
DAK	0.7297	Tidak Stasioner	0.0065	Stasioner
DAU	0.9652	Tidak Stasioner	0.0023	Stasioner
Pertumbuhan Ekonomi	0.3628	Tidak Stasioner	0.0000	Stasioner

IPM	1.0000	Tidak Stasioner	0.0062	Stasioner
-----	--------	-----------------	--------	-----------

Sumber : Hasil Olah Data dengan Eviews12

1. Tingkat level

- a. Hasil *Gini Ratio* mempunyai nilai probabilitas $> \alpha = (0.05)$, yaitu $0.8466 > 0.05$. Pada hal ini data level bidang tidak statis kemudian dilanjutkan dengan uji statis pada bidang pertama lainnya.
- b. Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai nilai probabilitas $> \alpha = (0.05)$ yaitu $0.9652 > 0.05$. Pada hal ini data level bidang tidak statis kemudian dilanjutkan dengan uji statis pada bidang pertama lainnya..
- c. Hasil Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai nilai probabilitas $> \alpha = (0.05)$ yaitu $0.7297 > 0,05$. Pada hal ini data level bidang tidak statis kemudian dilanjutkan dengan uji statis pada bidang pertama lainnya.
- d. Hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai nilai probabilitas $> \alpha = (0.05)$, yaitu $0.9719 > 0.05$. Pada hal ini data level bidang tidak statis kemudian dilanjutkan dengan uji statis pada bidang pertama lainnya.
- e. Hasil pertumbuhan ekonomi menunjukkan probabilitas $> \alpha = (0.05)$ yaitu $0.3628 > 0.05$. Pada hal ini data level bidang tidak statis kemudian dilanjutkan dengan uji statis pada bidang pertama lainnya.
- f. Hasil Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan probabilitas $> \alpha = (0.05)$ yaitu $0.5814 > 0.05$. Pada hal ini data level bidang tidak statis kemudian dilanjutkan dengan uji statis pada bidang pertama lainnya.

2. Tingkat 1st *Difference*

- a. Nilai probabilitas Gini Ratio $< \alpha = (0.05)$ yaitu $0.0035 < 0.05$. Hal ini berarti, data tersedia di tingkat perbedaan pertama.
- b. Nilai probabilitas Dana Alokasi Umum (DAU) $< \alpha = (0.05)$ yaitu $0.0023 < 0.05$. Hal ini berarti, data tersedia di tingkat perbedaan pertama.

- c. Nilai probabilitas Dana Alokasi Khusus (DAK) $< \alpha = (0.05)$ yaitu $0.0065 < 0.05$. Hal ini berarti, data tersedia di tingkat perbedaan pertama.
- d. Nilai probabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) $< \alpha = (0.05)$ yaitu $0.0028 < 0.05$. Hal ini berarti, data tersedia di tingkat perbedaan pertama.
- e. Nilai probabilitas pertumbuhan ekonomi $< \alpha = (0.05)$ yaitu $0.0000 < 0.05$. Hal ini berarti, data tersedia di tingkat perbedaan pertama.
- f. Nilai probabilitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) $< \alpha = (0.05)$ yaitu $0.0062 < 0.05$. Hal ini berarti, data tersedia di tingkat perbedaan pertama.

4.2.2. Uji Kointegrasi

Dalam menentukan kestasioneran residual hasil regresi diperlukan pengujian kointegrasi. Apabila variabel yang terlibat memiliki tingkat integrasi yang sama, maka residual tersebut akan mempunyai sifat stasioner. Hal sebaliknya, apabila variabel-variabel tersebut mempunyai tingkat integrasi yang berbeda, maka residual tidak akan mempunyai sifat stasioner. Berikut adalah hasil pengujian kointegrasi:

Tabel 4.3. Hasil Uji Kointegrasi

No	Variabel	Augment Dickey Fuller Test Statistik	Test Critical Values $\alpha = 5\%$ (0,05)	Prob.	Keterangan
1	ECT(-1)	-1.129102	-4.869778	0.0001	stasioner

Sumber : Hasil Olah Data dengan Eviews12

Disini variabel ECT dianggap stasioner sebab pada tabel diatas menunjukkan probabilitas yang lebih kecil daripada $\alpha = 5\%$ (0,05). Probabilitas mempunyai nilai yang lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ (0,05), yakni $0,0001 < 0,05$. Oleh sebab itu, hipotesis nol ditolak sehingga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dalam jangka panjang serta bisa dilanjutkan pengujian ECM.

4.3. Analisis Pengujian Statistik Estimasi *Error Correction Model* (ECM)

Pada penelitian ini, dalam mengolah data penulis menggunakan eviews 12. Variabel pada penelitian dianalisis dengan program ini menggunakan modal empiris yang sudah ditetapkan. Sesudah memperoleh hasil evaluasi, maka dilakukan dengan analisis berikutnya seperti yang dijelaskan di bawah ini:

4.3.1. Hasil Pengujian Jangka Panjang

Hasil pengujian stasioner sebelumnya mengungkapkan bahwa data yang diperiksa tidak stasioner pada level dasar, tetapi stasioner pada level first difference serta terdapat variabel kointegrasi di pengujian Engle-Granger. Antar variabel terjadi kointegrasi sehingga menunjukkan terdapat hubungan atau keseimbangan. Namun, pada jangka pendek, keseimbangan tidak bisa dicapai sebab para ekonom tidak sejalan dengan keinginan operator sehingga metode ECM akan mengoreksi kontradiksi tersebut (Widarjono, 2018). Ketika menganalisis hubungan jangka panjang dan jangka pendek bisa menggunakan metode ECM sebab terdapat kointegrasi antara variabel dependen dan independen.

Tabel 4.4. Model Jangka Panjang

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistics	Prob.*
LOG(DAU)	0.002379	0.023613	0.100732	0.9219
LOG(DAK)	-0.007031	0.002861	-2.457788	0.0276
LOG(PAD)	0.003988	0.006859	0.578389	0.5722
GROWTH	-0.000145	0.001742	-0.082959	0.9351
IPM	0.008430	0.005340	1.578674	0.1367

C	-0.225655	0.140736	-1.603391	0.1312
R-Squared	0.745507	F-statistic		8.202254
Adjusted R-Squared	0.654616	Prob (F-statistic)		0.000844

Sumber : Hasil Olah Data dengan Eviews12

Dari Tabel 4.4. di atas dapat dianalisa dengan hasilnya sebagai berikut:

a. Uji Keباikan Regresi

Adjusted R-squared adalah nilai koefisien determinasi yang disesuaikan sehingga gambarnya lebih mendekati mutu penjajakan model dalam populasi. Nilai adjusted R-squared = 0.654616 berarti ketimpangan pendapatan dapat dijelaskan oleh variabel DAU, DAK, PAD, Pertumbuhan Ekonomi, dan IPM sebesar 65,461% sisanya sebesar 34,539% dijelaskan oleh variabel lain. Berdasar pada hasil penilaian tersebut, besar kecilnya koefisien determinasi bisa dinyatakan pada penjelasan data yang diteliti dengan baik.

b. Uji F (Simultan)

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5$ (Variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen)

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5$ (Variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen)

Berdasarkan hasil regresi pada tabel diatas probabilitas F-Statistik bernilai $0.000844 < 0,05$ (Alpha 5 persen), sehingga H_0 ditolak yang mempunyai arti variabel bebas DAU, DAK, PAD, Pertumbuhan Ekonomi, dan IPM secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Rasio Gini.

c. Uji T (Parsial)

Hasil Uji T di bawah ini :

1. DAU

$H_0 : \beta_1 = 0$ (Variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen)

$H_a : \beta_1 < 0$ (Variabel independen secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel dependen)

Uji signifikansi DAU bisa diketahui dengan nilai koefisien sebesar 0.002379 dan nilai probabilitas sebesar $0.9219 > \alpha = 5\%$ maka gagal menolak H_0 atau tidak signifikan, sehingga dalam jangka panjang DAU secara parsial tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, hal ini tidak sesuai dengan hipotesis.

2. DAK

$H_0 : \beta_1 = 0$ (Variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen)

$H_a : \beta_1 < 0$ (Variabel independen secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel dependen)

Uji signifikansi DAK dapat diketahui dengan nilai koefisien -0.007031 dan nilai probabilitas sebesar $0.0276 < \alpha = 5\%$ maka menolak H_0 atau signifikan, sehingga dalam jangka panjang DAK secara parsial berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

3. PAD

$H_0 : \beta_1 = 0$ (Variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen)

$H_a : \beta_1 < 0$ (Variabel independen secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel dependen)

Uji signifikansi PAD dapat diketahui dengan nilai koefisien 0.003988 dan nilai probabilitas sebesar $0.5722 > \alpha = 5\%$ maka gagal menolak H_0 atau tidak signifikan, sehingga dalam jangka panjang PAD secara parsial tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan . Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis.

4. Pertumbuhan Ekonomi

$H_0 : \beta_1 = 0$ (Variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen)

$H_a : \beta_1 < 0$ (Variabel independen secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel dependen)

Uji signifikansi pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan nilai koefisien sebesar -0.000145 dan nilai probabilitas sebesar $0.9351 > \alpha = 5\%$ maka gagal menolak H_0 atau tidak signifikan, sehingga dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan . Hal tidak ini sesuai dengan hipotesis.

5. IPM

$H_0 : \beta_1 = 0$ (Variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen)

$H_a : \beta_1 < 0$ (Variabel independen secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel dependen)

Uji signifikansi IPM dapat diketahui dengan nilai koefisien sebesar 0.008430 dan nilai probabilitas sebesar $0.1367 > \alpha = 5\%$ maka gagal menolak H_0 atau tidak signifikan, sehingga dalam jangka panjang IPM secara parsial tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan . Hal tidak ini sesuai dengan hipotesis.

4.3.2. Hasil Pengujian Persamaan Jangka Pendek

Tabel 4.5. Model Jangka Pendek

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistics	Prob.*
D(LOG(DAU))	-0.035896	0.019356	-1.854471	0.0884
D(LOG(DAK))	-0.009887	0.003148	-3.141072	0.0085
D(LOG(PAD))	-0.004228	0.003995	-1.058227	0.3108
D(GROWTH)	0.000437	0.000912	0.469127	0.6405
D(IPM)	0.013316	0.010949	1.216173	0.2473
ECT(-1)	-1.528550	0.375511	-4.070585	0.0016
C	0.001586	0.005789	0.274061	0.7887
R-squared	0.715209	F-statistic		5.044694
Adjusted R-squared	0.572814	Prob(F-statistic)		0.008554

Sumber : Hasil Olah Data dengan Eviews12

Dari tabel di atas dapat dianalisa serta penjelasannya sebagai berikut:

a. Uji Keباikan Regresi

Adjusted R-squared adalah nilai koefisien determinasi yang disesuaikan sehingga gambarnya lebih mendekati mutu penajakan model dalam populasi. Adjusted R-Squared mempunyai nilai 0.572814 hal ini berarti ketimpangan pendapatan bisa di jelaskan menggunakan variabel DAU, DAK, PAD, pertumbuhan ekonomi, dan IPM sebesar 57,281% dan untuk sisanya yaitu 22,719% di jelaskan oleh variabel lainnya.

Besarnya koefisien determinasi dari hasil tersebut bisa dinyatakan baik dalam menjelaskan data yang diteliti.

b. Uji F (Simultan)

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5$ (Variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen)

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5$ (Variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen)

Berdasarkan hasil regresi pada tabel diatas probabilitas F –Statistik mempunyai nilai $0.008554 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$), sehingga menolak H_0 yang memiliki arti variabel independen DAU, DAK, PAD, pertumbuhan ekonomi, dan IPM secara simultan mempengaruhi variabel dependen ketimpangan pendapatan.

c. Uji T (Parsial)

Hasil Uji T sebagai berikut :

1. DAU

$H_0 : \beta_1 = 0$ (Variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen)

$H_a : \beta_1 < 0$ (Variabel independen secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel dependen)

Uji signifikansi DAU dapat diketahui dengan nilai koefisien sebesar -0.035896 dan nilai probabilitas sebesar $0.0884 < \alpha = 10\%$ maka menolak H_0 , sehingga secara parsial dalam jangka pendek DAU berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan . Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

2. DAK

$H_0 : \beta_1 = 0$ (Variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen)

$H_a : \beta_1 < 0$ (Variabel independen secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel dependen)

Uji signifikansi DAK dapat diketahui dengan nilai koefisien sebesar -- 0.009887 dan nilai probabilitas sebesar $0.0085 < \alpha = 5\%$ maka menolak H_0 , sehingga secara parsial dalam jangka pendek DAK berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan . Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

3. PAD

$H_0 : \beta_1 = 0$ (Variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen)

$H_a : \beta_1 < 0$ (Variabel independen secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel dependen)

Uji signifikansi PAD dapat diketahui dengan nilai koefisien sebesar -0.004228 dan nilai probabilitas sebesar $0.3108 > \alpha = 5\%$ maka gagal menolak H_0 , sehingga secara parsial dalam jangka pendek PAD tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan . Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis.

4. Pertumbuhan Ekonomi

$H_0 : \beta_1 = 0$ (Variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen)

$H_a : \beta_1 < 0$ (Variabel independen secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel dependen)

Uji signifikansi PAD dapat diketahui dengan nilai koefisien sebesar 0.000437 dan nilai probabilitas sebesar $0.6405 > \alpha = 5\%$ maka gagal menolak H_0 , sehingga secara parsial dalam jangka pendek pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan . Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis.

5. IPM

$H_0 : \beta_1 = 0$ (Variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen)

$H_a : \beta_1 < 0$ (Variabel independen secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel dependen)

Uji signifikansi IPM dapat diketahui dengan nilai koefisien sebesar 0.013316 dan nilai probabilitas sebesar $0.2473 > \alpha = 5\%$ maka gagal menolak H_0 , sehingga secara parsial dalam jangka pendek IPM tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis.

4.4. Pengujian Asumsi Klasik

4.4.1. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas mempunyai tujuan mengetahui apakah terdapat perbedaan variansi dan residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lain di model regresi. Pada penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji White dengan cara membandingkan nilai F-statistik dengan taraf signifikansi $\alpha = 5\%$.

Tabel 4.6. Uji Heteroskedastisitas

Heteroscedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	0.568722	Prob. F(6,12)	0.7481
Obs*R-squared	4.206653	Prob. Chi-Square(8)	0.6487

Sumber : Hasil Olah Data dengan Eviews12

Nilai P value pada tabel diatas yang ditunjukkan oleh nilai Obs*R-square sebesar 4.206653, sehingga $0.6487 > \alpha = 5\%$, maka, model regresi memiliki sifat homoskedastisitas.

4.4.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan caramelihat nilai toleransi dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan nilai tidak lebih dari 8 seperti tabel berikut ini. Cara untuk melakukan uji multikolinearitas adalah dengan melihat nilai toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF) yang nilainya tidak lebih dari 8 seperti tabel berikut;

Tabel 4.7. Uji Multikolinearitas

Variabel	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
D(LOG(DAU))	0.000475	1.698670	1.170131
D(LOG(DAK))	9.91E-06	1.678212	1.564224
D(LOG(PAD))	1.60E-05	1.364470	1.335952
D(GROWTH)	8.32E-07	1.086148	1.086031
D(IPM)	0.000120	6.986089	2.637885
ECT(-1)	0.141009	2.788828	2.773639
C	3.35E-05	5.252048	NA

Sumber : Hasil Olah Data dengan Eviews12

Berdasar tabel diatas, bisa disimpulkan nilai Faktor Inflasi Variansi (VIF) tidak lebih dari angka 8. Oleh sebab itu, data variabel independen tidak terdampak oleh multikolinieritas.

4.4.3. Uji Normalitas

Pada penelitian ini uji normalitas memakai metode Jarque-Bera. Hasil pengujian bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8. Uji Normalitas

Mean	1.83e-18
Median	-0.001404
Maximum	0.015674
Minimum	-0.014483
Std. Dev.	0.008990
Skewness	0.181136
Kurtosis	2.105846
Jarque-Bera	0.736845
Probability	0.691825

Sumber : Hasil Olah Data dengan Eviews12

Hasil uji normalitas di atas bisa dilihat dari nilai probabilitas sebesar $0,691825 > \alpha = 5\%$, sehingga residual berdistribusi normal.

4.4.4. Uji Autokorelasi

Definisi uji autokorelasi adalah sebagai hubungan antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan lainnya. Uji statistik Durbin Watson bisa digunakan untuk mengidentifikasi autokorelasi. Untuk memperoleh hasil perhitung bisa dari uji Breusch-Godfrey dengan cara menguji apakah probabilitas R-square lebih kecil atau besar dari $\alpha = 5\%$. . Berikut dilihat dari tabel:

Tabel 4.9. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: Null hypothesis : No serial correlation at up to 2 lags			
F-statistic	0.782056	Prob. F(2,10)	0.4835
Obs*R-squared	2.569859	Prob. Chi-Square(2)	0.2767

Sumber : Hasil Olah Data dengan Eviews12

Dari tabel diatas, bisa dilihat bahwa probabilitas R-squared sebesar 0.2767 lebih besar dari nilai α , yaitu 5%, hal ini berarti data variabel bebas tidak mengalami autokorelasi.

4.4.5. Uji Linearitas

Pengujian linearitas digunakan untuk memverifikasi keterkaitan antara variabel bebas dan variabel terikat dengan sifat linear dan bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.10. Uji Liniearitas

	Value	df	Probability
t-statistic	0.737041	11	0.4765
F-statistic	0.543229	(1,11)	0.4765
likelihood ratio	0.915871	1	0.3386

Sumber : Hasil Olah Data dengan Eviews12

Pada pengujian linearitas di atas digunakan uji Ramsey Reset Test, dan dapat diketahui pada kolom probabilitas pada baris F-statistik dengan nilai sebesar 0.4765 $> \alpha = 5\%$, hal ini berarti variabel independen mempunyai hubungan linear dengan variabel dependen.

4.5. Analisis Ekonomi

1. Pengaruh DAU terhadap Ketimpangan Pendapatan dalam Jangka Panjang dan Jangka Pendek

Berdasarkan hasil penelitian di atas nilai koefisien 0.002379 dan nilai probabilitas sebesar 0.9219 maka, DAU tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dalam jangka panjang. Pada jangka pendek nilai koefisien DAU sebesar -0.035896 dan nilai probabilitas sebesar 0.0884 maka, DAU berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan pada jangka pendek. Dengan demikian, hasil penelitian tidak sesuai hipotesis pada jangka panjang sedangkan di dalam jangka pendek sesuai hipotesis.

Meskipun DAU dalam jangka pendek berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan dikarenakan sebagian besar DAU digunakan untuk belanja pegawai. Hal tersebut menyebabkan pengaruh secara langsung dalam penurunan ketimpangan karena pendapatan pegawai mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridho (2021), yaitu DAU berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan meskipun kontribusinya kecil karena DAU sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai. Untuk jangka panjang hasil penelitiannya sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Santoso & Mukhlis (2021) DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. DAU seharusnya diprioritaskan untuk meningkatkan layanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum serta untuk mendukung pendanaan di wilayahnya. Apabila DAU dapat digunakan selayaknya maka, pendapatan masyarakat bisa meningkat dan ketimpangan pendapatan bisa menurun dalam jangka panjang.

2. Pengaruh DAK terhadap Ketimpangan Pendapatan dalam Jangka Panjang dan Jangka Pendek

Berdasarkan hasil penelitian di atas nilai koefisien -0.007031 dan nilai probabilitas sebesar 0.0276 maka, DAK berpengaruh negatif terhadap

ketimpangan pendapatan dalam jangka panjang. Pada jangka pendek nilai koefisien DAU sebesar -0.009887 dan nilai probabilitas sebesar 0.0085 maka, DAU berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan pada jangka pendek. Dengan demikian, hasil penelitian sesuai pada hipotesis jangka Panjang dan jangka pendek

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardhana (2023) dan Jamiel dkk. (2022), yang menyatakan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. DAK dari pemerintah pusat digunakan untuk pembangunan serta perbaikan sarana dan prasarana, seperti DAK di sektor pertanian, perikanan, transportasi, infrastruktur dasar, dan perdagangan di daerah yang bisa membantu mempermudah proses produksi atau mobilitas sehingga meningkatkan hasil produksi. Apabila hasil produksi meningkat maka, pendapatan masyarakat akan meningkat juga sehingga bisa mengurangi ketimpangan pendapatan.

3. Pengaruh PAD terhadap Ketimpangan Pendapatan dalam Jangka Panjang dan Jangka Pendek

Berdasarkan hasil penelitian di atas nilai koefisien 0.003988 dan nilai probabilitas sebesar 0.5722 maka, PAD tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan dalam jangka panjang. Pada jangka pendek nilai koefisien DAU sebesar -0.004228 dan nilai probabilitas sebesar 0.3108 maka, DAU tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan pada jangka pendek. Dengan demikian, hasil penelitian tidak sesuai pada hipotesis jangka panjang dan jangka pendek.

Hal ini diduga karena peningkatan potensi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi DIY belum dilaksanakan dengan maksimal sehingga PAD nya masih tergolong rendah, dimana apabila realisasi PAD masih rendah mencerminkan kondisi kemandirian daerahnya yang masih rendah sehingga belum bisa mengatasi masalah pembangunannya dimana salah

satunya terkait ketimpangan pendapatan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saptono., dkk (2022) dimana PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Berdasarkan hasil penelitian Saptono., dkk (2022) variabel pendapatan asli daerah mengalami kenaikan, tetapi tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur. Pendapatan asli daerah yang semakin besar dan merata akan mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga akan menurunkan angka ketimpangan pendapatan di setiap daerah. Penelitian lain yang mempunyai hasil sama adalah penelitian yang dilakukan Ardana (2018) dimana PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

4. Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan dalam Jangka Panjang dan Jangka Pendek

Berdasarkan hasil penelitian di atas nilai koefisien -0.000145 dan nilai probabilitas sebesar 0.9351 maka, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan dalam jangka panjang. Pada jangka pendek nilai koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar 0.000437 dan nilai probabilitas sebesar 0.6405 maka, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan pada jangka pendek. Dengan demikian, hasil penelitian tidak sesuai pada hipotesis jangka panjang dan jangka pendek.

Hal ini diduga karena kondisi pertumbuhan ekonomi di provinsi DIY tidak merata di setiap kabupaten ataupun kota sehingga berdampak pada pendapatan masyarakat di daerah yang pertumbuhan ekonomi rendah sehingga akan mengakibatkan ketimpangan pendapatan dengan daerah yang pertumbuhan ekonominya lebih baik. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muharam (2022) dimana pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi DIY tahun 2015-2020. Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan hal ini dikarenakan belum meratanya pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah Provinsi Yogyakarta sehingga yang terjadi adalah trickle up effect dalam penjelasannya yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin akan menjadi semakin miskin sehingga pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan dinikmati oleh kalangan atas saja, hal tersebut yang menjadi penyebab mengapa pertumbuhan ekonomi tidak cukup berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Yogyakarta. Penelitian lain yang mempunyai hasil sama adalah penelitian Arif dan Wicaksana (2017) dimana pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan karena pertumbuhan ekonomi tidak berakibat langsung terhadap ketimpangan pendapatan di daerah peneliti. Di daerah peneliti terdapat beberapa kota dengan pendapatan tinggi sedangkan daerah-daerah lainnya berpendapatan rendah sehingga menjadi indikator terjadinya ketimpangan pendapatan di daerah peneliti.

5. Pengaruh IPM terhadap Ketimpangan Pendapatan dalam Jangka Panjang dan Jangka Pendek

Berdasarkan hasil penelitian di atas nilai koefisien 0.008430 dan nilai probabilitas sebesar 0.1367 maka, IPM tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan dalam jangka panjang. Pada jangka pendek nilai koefisien IPM sebesar 0.013316 dan nilai probabilitas sebesar 0.2473 maka, IPM tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan pada jangka pendek. Dengan demikian, hasil penelitian tidak sesuai pada hipotesis jangka panjang dan jangka pendek.

Hal ini diduga karena belum meratanya IPM di provinsi DIY sehingga berdampak pada perbedaan produktivitas tenaga kerja di daerah yang IPM nya lebih rendah dengan yang IPM nya lebih tinggi. Perbedaan produktivitas ini kemudian berdampak pada pendapatan tenaga kerja sehingga daerah yang

mempunyai IPM lebih baik akan memiliki pendapatan tenaga kerja yang lebih tinggi daripada daerah IPM yang lebih rendah kemudian hal ini berakibat pada terjadinya ketimpangan pendapatan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ersad, dkk (2022) dimana IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini disebabkan karena di daerah peneliti, sektor yang paling besar berkontribusi terhadap PDRB adalah sektor yang dalam proses produksinya membutuhkan jumlah tenaga kerja yang besar, tetapi pekerja-pekerja tersebut tidak mempunyai IPM tinggi sehingga IPM tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita yang berarti ketimpangan pendapatan tetap ada. Hasil penelitian ini juga mempunyai hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriyani dan Anis (2022) dimana IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Menurut Febriyani dan Anis (2022) kualitas Indeks Pembangunan Manusia diseluruh provinsi yang berada di Indonesia dari tahun 2007-2016 termasuk pada level sedang. Dapat disimpulkan bahwasannya secara keseluruhan daerah atau provinsi yang berada di Indonesia sudah mulai memperhatikan pembangunan kualitas sumber daya manusianya di masing-masing daerah yang berada di seluruh Indonesia. Apabila mutu pendidikan antar daerah meningkat maka, kualitas sumber daya manusia semakin merata antar wilayah sehingga bisa menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Variabel DAU signifikan dalam jangka pendek hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa variabel DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, tetapi dalam jangka panjang tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di D.I. Yogyakarta hal ini tidak sesuai dengan hipotesis. Hal ini dikarenakan diduga DAU lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai daripada belanja untuk meningkatkan layanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum serta untuk pendanaan kelurahan sehingga berdampak pada ketimpangan pendapatan di provinsi D.I. Yogyakarta hanya pada jangka pendek.
2. Variabel DAK signifikan dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap ketimpangan pendapatan di D.I. Yogyakarta hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa variabel DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. DAK dari pemerintah pusat digunakan untuk pembangunan serta perbaikan sarana dan prasarana, seperti DAK di sektor pertanian, perikanan, transportasi, infrastruktur dasar, dan perdagangan di daerah sehingga dapat mempermudah produksi dan hasil produksi juga akan meningkat. Apabila hasil produksi meningkat maka, pendapatan masyarakat juga akan meningkat sehingga ketimpangan pendapatan dapat berkurang.
3. Variabel PAD tidak signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang di D.I. Yogyakarta hal ini tidak sesuai dengan hipotesis. Hal ini diduga karena peningkatan potensi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi DIY belum maksimal sehingga PAD nya masih tergolong rendah, apabila realisasi PAD masih rendah mencerminkan kondisi kemandirian daerahnya yang masih rendah sehingga belum dapat mengatasi masalah pembangunannya salah satunya adalah ketimpangan pendapatan
4. Variabel pertumbuhan ekonomi tidak signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang di D.I. Yogyakarta hal ini tidak sesuai dengan hipotesis. Hal ini

dikarenakan diduga pertumbuhan ekonomi tidak menyebar secara merata di D.I. Yogyakarta sehingga pendapatan di daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dengan yang rendah akan berbeda serta memunculkan ketimpangan pendapatan

5. Variabel IPM tidak signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang di D.I. Yogyakarta hal ini tidak sesuai dengan hipotesis. Hal ini diduga karena belum meratanya IPM di provinsi DIY sehingga berdampak pada perbedaan produktivitas tenaga kerja di daerah dengan IPM lebih rendah dengan yang IPM nya lebih tinggi. Perbedaan produktivitas ini berpengaruh terhadap pendapatan tenaga kerja sehingga perbedaan pendapatan tenaga kerja akan muncul yang kemudian pada akhirnya akan mengakibatkan ketimpangan pendapatan.

5.2. Implikasi

1. Pemerintah provinsi D.I. Yogyakarta dapat memprioritaskan realisasi dari anggaran DAU untuk pelayanan dari pemerintah ke masyarakat. Apabila pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan maka, dapat untuk meningkatkan pemerataan peningkatan pendapatan sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan
2. DAK berpengaruh dalam menurunkan ketimpangan pendapatan di D.I. Yogyakarta. Oleh sebab itu pemerintah D.I.Y perlu meningkatkan realisasi DAK agar ketimpangan pendapatan dapat lebih berkurang
3. Pemerintah provinsi D.I. Yogyakarta meningkatkan PAD melalui peningkatan potensi ekonominya sehingga dapat mandiri dan menurunkan ketimpangan pendapatan
4. Pemerintah provinsi D.I. Yogyakarta perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang di daerah pertumbuhan ekonominya rendah sehingga apabila pertumbuhan ekonomi lebih merata maka, pemerataan

peningkatan pendapatan dapat terjadi dan ketimpangan pendapatan dapat menurun

5. IPM di D.I. Yogyakarta perlu dimeratakan lagi agar dapat untuk meningkatkan produktivitas masyarakatnya sehingga pendapatan akan meningkat dan ketimpangan pendapatan di D.I. Yogyakarta dapat menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, B. P., Kirya, I. K., & Susila, G. P. (2018). Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Buleleng. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2), 95-104.
- Ajija, S., Sari, D., Setianto, R., & Primanti, M. (2011). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Alpi M. F., & F., S. R. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 2(3), 400-404.
- Anshori, R. (2020). *Penyebab Ketimpangan Ekonomi di Yogyakarta*. Retrieved from Tagar.id: <https://www.tagar.id/penyebab-ketimpangan-ekonomi-di-yogyakarta/>
- Azwar, & Subekan, A. (2016). Analisis Determinan Kemiskinan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 2(1), 1-25.
- Arafia, D., & Firman, T. (2013). Dampak Dana Perimbangan pada Era Desentralisasi terhadap Kesenjangan Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota SAPPK*, 1-10.
- Ardianti, A. V., Wibisono, S., & Jumiaty, A. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Angka Harapan Hidup di Jember. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 1-6.
- Ariefianto, M. D. (2012). *Ekonometrika, Sensi, dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta: Erlangga.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP Stim YKPN.
- Attaqi, M. N. (2023). *Pengaruh IPM, Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2016-2021* (Skripsi Sarjana tidak dipublikasikan). Universitas Islam Indonesia
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi 2012-2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi 2015-2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi 2018-2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi 2021-2022*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi 2022-2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *[Seri 2010] Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (Persen)*.
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjksIzI=/-seri-2010--laju-pertumbuhan-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010--menurut-provinsi.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta (2024). *gini rasio*.
<https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/141/6/gini-rasio.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta (2024, Desember 10). *gini ratio menurut kabupaten-kota*. <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/333/1/gini-ratio-menurut-kabupaten-kota.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta (2024). *indeks pembangunan manusia ipm metode lama*. <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/26/33/4/indeks-pembangunan-manusia-ipm-metode-lama-.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta (2024, Februari 10). *metode baru indeks pembangunan manusia*. <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/26/316/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia.html>
- Bapenda. (2014). *Memahami Konsep dan Penghitungan Dana Alokasi Umum*.
<https://bapenda.inhukab.go.id/web/detailberita/189>
- Bappenas. (2020). *Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK)*.
<https://sikompak.bappenas.go.id/detail-pembelajaran/dak>
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS dan Eviews*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ekananda, M. (2018). *Analisis Ekonometrika untuk Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Febriansah, R. E., & Prapanca, D. (2019). *Buku Ajar Mata Kuliah Ekonomi Pembangunan*. Sidoarjo: Umsida Press.
- Gujarati, D. (1995). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Erlangga.
- Gujarati, D. (2004). *Basic Econometrics (Ekonometrika Dasar) Alib Bahasa Sumarno Zain*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Gujarati, D & Dawn. (2010). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hartati, Y. S. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura*, 12(1),79-92
- Hardjanto, I. (2011). *Teori Pembangunan*. Malang: UB Press.

- Indrawati, I., Sarfiah, S. N., & Destiningsih, R. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Papua Tahun 2014-2019. *Dinamic: Directory Journal of Economic*, 2(4), 1068-1080.
- Ismail, E. T. (2019). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Edisi 4)*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Istiqamah, Syaparuddin, & Rahmadi, S. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (studi provinsi-provinsi di Indonesia). *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 7(3), 111-126.
- Jamiel, H. N., Anwar, N., Arifin, A., Yanti, R. A., & Ilah. (2022). Determinan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Edukasi*, 10(2), 173-178.
- Kuncoro, M. (2010). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, M. (2011). *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasinya untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kunenengan, R. M., Engka, D. S., & Rorong, I. P. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Lima Kabupaten/Kota di Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(3) 133-144.
- Kuntoro, E., Anggaraeni, L., & Widyastutik. (2020). Pengaruh Keterbukaan Ekonomi dan Transformasi Struktural terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Proceeding Sendiu*, 545-552.
- Laksani, C. S. (2010). *Analisis pro-poor Growth di Indonesia melalui Identifikasi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan* (Tesis Magister tidak dipublikasikan). Universitas Indonesia.
- Muharam, K. I. (2022). Analisis Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2020. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(2), 284-294.
- Nurhemi, & Suryani, G. (2015). Dampak Otonomi Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 183-205.
- Pradnyadewi, D., & Purbadharma, I. B. (2017). Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali. *E-jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(2), 255-285.

- Pratiwi, F. (2020). *Apa yang dimaksud dengan distribusi pendapatan*.
<https://www.harmony.co.id/blog/apa-yang-dimaksud-dengan-distribusi-pendapatan>
- Putra, P. G., & Ulupui, I. G. (2015). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 11(3), 863-877.
- Putri, N. P., & Nata, I. K. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. *E-Jurnal EP Unud*, 4(1), 41-49.
- Rahutami, A. I. (2011). *Modul Ekonometri Keuangan*.
- Randa, F. (2022). Dampak Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Al-Intifaq*, 2(2), 1-7.
- Ridho, M. A. (2021). *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia* (Skripsi Sarjana tidak Dipublikasikan). Universitas Islam Indonesia.
- Rosadi, D. (2012). *Ekonometrika dan Analisis Runtun Waktu Terapan dengan Eviews*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sinaga, W. (2023). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 203-2019.
- Sobari, A. (2009). *Analisis Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Tahun 2000-2008* (Skripsi Sarjana tidak dipublikasikan). Institut Pertanian Bogor
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyo, R. A. (2017). *Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta (tahun 2012-2016)* (Skripsi Sarjana tidak dipublikasikan). Universitas Islam Indonesia
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic Development*. Boston: Pearson.
- Utami, R. B. (2020). Analisis Pengaruh Beban Ketergantungan, Kepadatan Penduduk, Garis Kemiskinan terhadap Indeks Gini di Indonesia. *MTPH Journal*, 4(2), 212-223.
- Walpole, R. E., & Myers, R. H. (1995). *Ilmu Peluang dan Statistika untuk Insinyur dan Ilmuan Edisi ke-4*. Bandung: Penerbit ITB.
- Wardhana, A., Juanda, B., Siregar, H., & Wibowo, K. (2013). Dampak Transfer Pemerintah Pusat terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 15(2), 111-118.

- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews + Disertai CD Data*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Widarjono, A. (2019). *Statistik Terapan dengan Excel dan SPSS*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Yoertiara, R. F., & Feriyanto, N. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi-provinsi di Pulau Jawa. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 1(1), 92-100.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Tabel Data Penelitian

Tahun	Rasio Gini (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	DAU (Ribu Rupiah)	PAD (Ribu Rupiah)	DAK (Ribu Rupiah)	IPM (%)
2003	0.407	4.58	201960000	263309000	5500000	71.5
2004	0.378	5.12	248049000	34741000	45660000	72.91
2005	0.376	4.73	238692000	401912000	51410000	73.50
2006	0.376	3.7	402484000	436095000	126495000	73.70
2007	0.407	4.31	437379000	488686000	175934000	74.15
2008	0.401	5.03	511773394	632883000	19468000	74.88
2009	0.434	4.43	523919948	645245000	33410000	75.23
2010	0.439	4.88	527471247	740202000	11384100	75.77
2011	0.419	5.21	620812328	866926000	19489600	76.32
2012	0.433	5.37	757056696	1004063000	19052740	76.75
2013	0.420	5.47	828334768	1216102000	34495900	77.37
2014	0.432	5.17	899923550	1464604000	37131610	76.81
2015	0.441	4.95	920544722	1593110000	39084040	77.59
2016	0.423	5.05	940835434	1673749000	643207673	78.38
2017	0.432	5.26	1314372147	1851973000	967000859	78.89
2018	0.441	6.2	1314262108	2041096405	910032137	79.53
2019	0.423	6.59	1351102020	2082795335	978540310	79.99
2020	0.434	-2.67	1359606154	1876706929	1127331617	79.97
2021	0.441	5.58	1265379234	1900923074	1317766377	80.22
2022	0.459	5.15	1224852487	2002159849	946172207	80.64

Sumber : Badan Pusat Statistika (BPS) (2024)

Lampiran II Uji Stasioneritas

- TINGKAT LEVEL

- DAU

Null Hypothesis: DAU has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	1.554309	0.9652
Test critical values: 1% level	-2.692358	
5% level	-1.960171	
10% level	-1.607051	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 19

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(DAU)

Method: Least Squares

Date: 03/05/24 Time: 16:51

Sample (adjusted): 2004 2022

Included observations: 19 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DAU(-1)	0.043306	0.027862	1.554309	0.1375
R-squared	-0.166130	Mean dependent var		53836447
Adjusted R-squared	-0.166130	S.D. dependent var		97376952
S.E. of regression	1.05E+08	Akaike info criterion		39.83096
Sum squared resid	1.99E+17	Schwarz criterion		39.88067
Log likelihood	-377.3942	Hannan-Quinn criter.		39.83938
Durbin-Watson stat	1.846802			

- DAK

Null Hypothesis: DAK has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	0.188089	0.7297
Test critical values: 1% level	-2.692358	
5% level	-1.960171	
10% level	-1.607051	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
and may not be accurate for a sample size of 19

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(DAK)

Method: Least Squares

Date: 03/05/24 Time: 16:50

Sample (adjusted): 2004 2022

Included observations: 19 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DAK(-1)	0.014982	0.079652	0.188089	0.8529
R-squared	-0.068159	Mean dependent var		49509064
Adjusted R-squared	-0.068159	S.D. dependent var		1.92E+08
S.E. of regression	1.98E+08	Akaike info criterion		41.09999
Sum squared resid	7.08E+17	Schwarz criterion		41.14969
Log likelihood	-389.4499	Hannan-Quinn criter.		41.10840
Durbin-Watson stat	1.440470			

- PAD

Null Hypothesis: PAD has a unit root
 Exogenous: None
 Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=6)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	1.675385	0.9719
Test critical values: 1% level	-2.699769	
5% level	-1.961409	
10% level	-1.606610	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
 Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
 and may not be accurate for a sample size of 18

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(PAD)
 Method: Least Squares
 Date: 03/05/24 Time: 16:54
 Sample (adjusted): 2005 2022
 Included observations: 18 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAD(-1)	0.051408	0.030684	1.675385	0.1133
D(PAD(-1))	0.071057	0.245032	0.289992	0.7755
R-squared	-0.472732	Mean dependent var		1.09E+08
Adjusted R-squared	-0.564778	S.D. dependent var		1.19E+08
S.E. of regression	1.49E+08	Akaike info criterion		40.57977
Sum squared resid	3.55E+17	Schwarz criterion		40.67870
Log likelihood	-363.2180	Hannan-Quinn criter.		40.59341
Durbin-Watson stat	1.077263			

- Pertumbuhan Ekonomi

Null Hypothesis: GROWTH has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=6)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-0.780908	0.3628
Test critical values: 1% level	-2.708094	
5% level	-1.962813	
10% level	-1.606129	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
and may not be accurate for a sample size of 17

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(GROWTH)

Method: Least Squares

Date: 03/05/24 Time: 16:52

Sample (adjusted): 2006 2022

Included observations: 17 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GROWTH(-1)	-0.088013	0.112706	-0.780908	0.4479
D(GROWTH(-1))	-0.943915	0.245999	-3.837062	0.0018
D(GROWTH(-2))	-0.912902	0.316647	-2.883024	0.0120
R-squared	0.558595	Mean dependent var		0.024706
Adjusted R-squared	0.495538	S.D. dependent var		3.141170
S.E. of regression	2.231032	Akaike info criterion		4.601591
Sum squared resid	69.68508	Schwarz criterion		4.748629
Log likelihood	-36.11353	Hannan-Quinn criter.		4.616207
Durbin-Watson stat	2.068724			

- IPM

Null Hypothesis: IPM has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	5.289900	1.0000
Test critical values: 1% level	-2.692358	
5% level	-1.960171	
10% level	-1.607051	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
and may not be accurate for a sample size of 19

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(IPM)

Method: Least Squares

Date: 03/05/24 Time: 16:53

Sample (adjusted): 2004 2022

Included observations: 19 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
IPM(-1)	0.006215	0.001175	5.289900	0.0000
R-squared	-0.036700	Mean dependent var		0.481053
Adjusted R-squared	-0.036700	S.D. dependent var		0.384952
S.E. of regression	0.391952	Akaike info criterion		1.015840
Sum squared resid	2.765272	Schwarz criterion		1.065547
Log likelihood	-8.650481	Hannan-Quinn criter.		1.024253
Durbin-Watson stat	1.766963			

- Rasio Gini

Null Hypothesis: GR has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	0.644493	0.8466
Test critical values: 1% level	-2.692358	
5% level	-1.960171	
10% level	-1.607051	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
and may not be accurate for a sample size of 19

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(GR)

Method: Least Squares

Date: 03/05/24 Time: 16:51

Sample (adjusted): 2004 2022

Included observations: 19 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GR(-1)	0.005953	0.009237	0.644493	0.5274
R-squared	-0.004679	Mean dependent var		0.002737
Adjusted R-squared	-0.004679	S.D. dependent var		0.016845
S.E. of regression	0.016885	Akaike info criterion		-5.273640
Sum squared resid	0.005132	Schwarz criterion		-5.223933
Log likelihood	51.09958	Hannan-Quinn criter.		-5.265227
Durbin-Watson stat	2.289697			

- Tingkat *First Difference*

- DAU

Null Hypothesis: D(DAU) has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.322020	0.0023
Test critical values: 1% level	-2.699769	
5% level	-1.961409	
10% level	-1.606610	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 18

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(DAU,2)

Method: Least Squares

Date: 03/05/24 Time: 16:51

Sample (adjusted): 2005 2022

Included observations: 18 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(DAU(-1))	-0.786189	0.236660	-3.322020	0.0040
R-squared	0.392914	Mean dependent var		-4811986.
Adjusted R-squared	0.392914	S.D. dependent var		1.44E+08
S.E. of regression	1.12E+08	Akaike info criterion		39.96047
Sum squared resid	2.13E+17	Schwarz criterion		40.00993
Log likelihood	-358.6442	Hannan-Quinn criter.		39.96729
Durbin-Watson stat	2.086741			

- DAK

Null Hypothesis: D(DAK) has a unit root
 Exogenous: None
 Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.888266	0.0065
Test critical values: 1% level	-2.699769	
5% level	-1.961409	
10% level	-1.606610	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
 Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
 and may not be accurate for a sample size of 18

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(DAK,2)
 Method: Least Squares
 Date: 03/05/24 Time: 16:50
 Sample (adjusted): 2005 2022
 Included observations: 18 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(DAK(-1))	-0.761596	0.263686	-2.888266	0.0102
R-squared	0.322844	Mean dependent var	-22875232	
Adjusted R-squared	0.322844	S.D. dependent var	2.42E+08	
S.E. of regression	1.99E+08	Akaike info criterion	41.11262	
Sum squared resid	6.75E+17	Schwarz criterion	41.16209	
Log likelihood	-369.0136	Hannan-Quinn criter.	41.11944	
Durbin-Watson stat	1.661487			

- PAD

Null Hypothesis: D(PAD) has a unit root
 Exogenous: None
 Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.245253	0.0028
Test critical values: 1% level	-2.699769	
5% level	-1.961409	
10% level	-1.606610	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
 and may not be accurate for a sample size of 18

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(PAD,2)
 Method: Least Squares
 Date: 03/05/24 Time: 16:54
 Sample (adjusted): 2005 2022
 Included observations: 18 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(PAD(-1))	-0.720262	0.221943	-3.245253	0.0048
R-squared	0.376953	Mean dependent var		18322488
Adjusted R-squared	0.376953	S.D. dependent var		1.98E+08
S.E. of regression	1.57E+08	Akaike info criterion		40.63030
Sum squared resid	4.17E+17	Schwarz criterion		40.67976
Log likelihood	-364.6727	Hannan-Quinn criter.		40.63712
Durbin-Watson stat	1.197103			

- Pertumbuhan Ekonomi

Null Hypothesis: D(GROWTH) has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=6)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-5.775518	0.0000
Test critical values: 1% level	-2.708094	
5% level	-1.962813	
10% level	-1.606129	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
and may not be accurate for a sample size of 17

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(GROWTH,2)

Method: Least Squares

Date: 03/05/24 Time: 16:53

Sample (adjusted): 2006 2022

Included observations: 17 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(GROWTH(-1))	-2.900636	0.502230	-5.775518	0.0000
D(GROWTH(-1),2)	0.911866	0.312499	2.917980	0.0106
R-squared	0.849185	Mean dependent var	-0.002353	
Adjusted R-squared	0.839131	S.D. dependent var	5.489674	
S.E. of regression	2.201824	Akaike info criterion	4.526581	
Sum squared resid	72.72045	Schwarz criterion	4.624606	
Log likelihood	-36.47593	Hannan-Quinn criter.	4.536324	
Durbin-Watson stat	2.073353			

- IPM

Null Hypothesis: D(IPM) has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.906359	0.0062
Test critical values: 1% level	-2.699769	
5% level	-1.961409	
10% level	-1.606610	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
and may not be accurate for a sample size of 18

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(IPM,2)

Method: Least Squares

Date: 03/05/24 Time: 16:53

Sample (adjusted): 2005 2022

Included observations: 18 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(IPM(-1))	-0.483188	0.166252	-2.906359	0.0098
R-squared	0.324349	Mean dependent var		-0.055000
Adjusted R-squared	0.324349	S.D. dependent var		0.530818
S.E. of regression	0.436322	Akaike info criterion		1.233079
Sum squared resid	3.236403	Schwarz criterion		1.282544
Log likelihood	-10.09771	Hannan-Quinn criter.		1.239900
Durbin-Watson stat	2.248735			

- Rasio Gini

Null Hypothesis: D(GR) has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=6)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.169825	0.0035
Test critical values: 1% level	-2.708094	
5% level	-1.962813	
10% level	-1.606129	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 17

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(GR,2)

Method: Least Squares

Date: 03/05/24 Time: 16:52

Sample (adjusted): 2006 2022

Included observations: 17 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(GR(-1))	-1.308591	0.412827	-3.169825	0.0063
D(GR(-1),2)	0.005870	0.245449	0.023916	0.9812
R-squared	0.630637	Mean dependent var		0.001176
Adjusted R-squared	0.606013	S.D. dependent var		0.026130
S.E. of regression	0.016401	Akaike info criterion		-5.272768
Sum squared resid	0.004035	Schwarz criterion		-5.174743
Log likelihood	46.81853	Hannan-Quinn criter.		-5.263024
Durbin-Watson stat	1.902169			

Lampiran III Uji Kointegrasi

Null Hypothesis: ECT has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-4.869778	0.0001
Test critical values: 1% level	-2.692358	
5% level	-1.960171	
10% level	-1.607051	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 19

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(ECT)

Method: Least Squares

Date: 03/05/24 Time: 16:38

Sample (adjusted): 2004 2022

Included observations: 19 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
ECT(-1)	-1.129102	0.231859	-4.869778	0.0001
R-squared	0.568492	Mean dependent var	-6.06E-05	
Adjusted R-squared	0.568492	S.D. dependent var	0.017282	
S.E. of regression	0.011353	Akaike info criterion	-6.067537	
Sum squared resid	0.002320	Schwarz criterion	-6.017830	
Log likelihood	58.64160	Hannan-Quinn criter.	-6.059125	
Durbin-Watson stat	1.956719			

Lampiran IV Uji ECM

- Jangka Panjang

Dependent Variable: GR

Method: Least Squares

Date: 03/05/24 Time: 16:36

Sample: 2003 2022

Included observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(DAU)	0.002379	0.023613	0.100732	0.9212
LOG(DAK)	-0.007031	0.002861	-2.457788	0.0276
LOG(PAD)	0.003988	0.006895	0.578389	0.5722
GROWTH	-0.000145	0.001742	-0.082959	0.9351
IPM	0.008430	0.005340	1.578674	0.1367
C	-0.225655	0.140736	-1.603391	0.1312
R-squared	0.745507	Mean dependent var	0.420800	
Adjusted R-squared	0.654616	S.D. dependent var	0.023391	
S.E. of regression	0.013746	Akaike info criterion	-5.492747	
Sum squared resid	0.002646	Schwarz criterion	-5.194027	
Log likelihood	60.92747	Hannan-Quinn criter.	-5.434434	
F-statistic	8.202254	Durbin-Watson stat	2.032235	
Prob(F-statistic)	0.000844			

- Jangka Pendek

Dependent Variable: D(GR)

Method: Least Squares

Date: 03/05/24 Time: 16:39

Sample (adjusted): 2004 2022

Included observations: 19 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(LOG(DAU))	-0.035896	0.019356	-1.854471	0.0884
D(LOG(DAK))	-0.009887	0.003148	-3.141072	0.0085
D(LOG(PAD))	-0.004228	0.003995	-1.058227	0.3108
D(GROWTH)	0.000437	0.000912	0.479127	0.6405
D(IPM)	0.013316	0.010949	1.216173	0.2473
ECT(-1)	-1.528550	0.375511	-4.070585	0.0016
C	0.001586	0.005789	0.274061	0.7887
R-squared	0.715209	Mean dependent var	0.002737	
Adjusted R-squared	0.572814	S.D. dependent var	0.016845	
S.E. of regression	0.011010	Akaike info criterion	-5.902729	
Sum squared resid	0.001455	Schwarz criterion	-5.554777	
Log likelihood	63.07592	Hannan-Quinn criter.	-5.843842	
F-statistic	5.022694	Durbin-Watson stat	1.695922	
Prob(F-statistic)	0.008554			

Lampiran V Uji Asumsi Klasik

- Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
 Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.568722	Prob. F(6,12)	0.7481
Obs*R-squared	4.206653	Prob. Chi-Square(6)	0.6487
Scaled explained SS	0.927805	Prob. Chi-Square(6)	0.9882

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 03/05/24 Time: 16:40

Sample: 2004 2022

Included observations: 19

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.000104	4.70E-05	2.204755	0.0477
D(LOG(DAU))	-4.40E-05	0.000157	-0.280160	0.7841
D(LOG(DAK))	-2.62E-05	2.56E-05	-1.024591	0.3258
D(LOG(PAD))	-1.37E-05	3.24E-05	-0.422956	0.6798
D(GROWTH)	-1.11E-06	7.40E-06	-0.150067	0.8832
D(IPM)	-2.60E-05	8.89E-05	-0.292350	0.7750
ECT(-1)	0.002157	0.003049	0.707519	0.4928

R-squared	0.221403	Mean dependent var	7.66E-05
Adjusted R-squared	-0.167896	S.D. dependent var	8.27E-05
S.E. of regression	8.94E-05	Akaike info criterion	-15.52983
Sum squared resid	9.59E-08	Schwarz criterion	-15.18188
Log likelihood	154.5334	Hannan-Quinn criter.	-15.47094
F-statistic	0.568722	Durbin-Watson stat	2.580576
Prob(F-statistic)	0.748057		

- Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.782056	Prob. F(2,10)	0.4835
Obs*R-squared	2.569859	Prob. Chi-Square(2)	0.2767

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 03/05/24 Time: 16:41

Sample: 2004 2022

Included observations: 19

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(LOG(DAU))	-0.008238	0.022588	-0.364724	0.7229
D(LOG(DAK))	0.000955	0.003298	0.289507	0.7781
D(LOG(PAD))	-0.000984	0.004260	-0.231067	0.8219
D(GROWTH)	-0.000490	0.001011	-0.485270	0.6379
D(IPM)	-0.001773	0.011260	-0.157496	0.8780
ECT(-1)	-0.280459	0.484497	-0.578866	0.5755
C	0.001541	0.006169	0.249808	0.8078
RESID(-1)	0.579824	0.585283	0.990673	0.3452
RESID(-2)	-0.426425	0.381227	-1.118559	0.2895

R-squared	0.135256	Mean dependent var	1.83E-18
Adjusted R-squared	-0.556540	S.D. dependent var	0.008990
S.E. of regression	0.011216	Akaike info criterion	-5.837524
Sum squared resid	0.001258	Schwarz criterion	-5.390158
Log likelihood	64.45648	Hannan-Quinn criter.	-5.761812
F-statistic	0.195514	Durbin-Watson stat	1.856242
Prob(F-statistic)	0.985127		

- Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

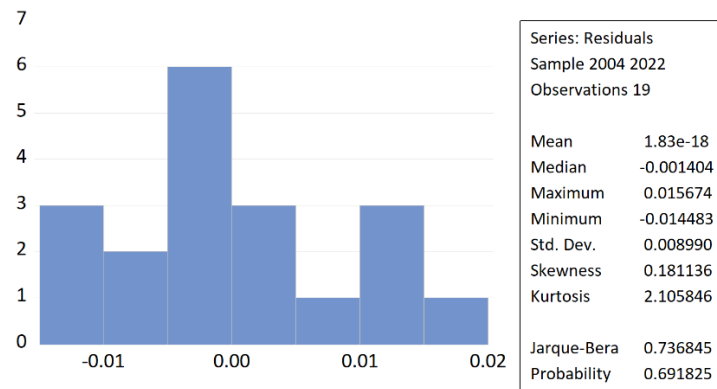
Date: 03/05/24 Time: 16:39

Sample: 2003 2022

Included observations: 19

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
D(LOG(DAU))	0.000375	1.698670	1.170131
D(LOG(DAK))	9.91E-06	1.678212	1.564224
D(LOG(PAD))	1.60E-05	1.364470	1.335952
D(GROWTH)	8.32E-07	1.086148	1.086031
D(IPM)	0.000120	6.986089	2.637885
ECT(-1)	0.141009	2.788828	2.773639
C	3.35E-05	5.252048	NA

- Normalitas



- Linieritas

Ramsey RESET Test

Equation: UNTITLED

Omitted Variables: Squares of fitted values

Specification: D(GR) D(LOG(DAU)) D(LOG(DAK)) D(LOG(PAD))

D(GROWTH) D(IPM) ECT(-1) C

	Value	df	Probability
t-statistic	0.737041	11	0.4765
F-statistic	0.543229	(1, 11)	0.4765
Likelihood ratio	0.915871	1	0.3386

F-test summary:

	Sum of Sq.	df	Mean Squares
Test SSR	6.85E-05	1	6.85E-05
Restricted SSR	0.001455	12	0.000121
Unrestricted SSR	0.001386	11	0.000126

LR test summary:

	Value
Restricted LogL	63.07592
Unrestricted LogL	63.53386

Unrestricted Test Equation:

Dependent Variable: D(GR)

Method: Least Squares

Date: 03/05/24 Time: 16:40

Sample: 2004 2022

Included observations: 19

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(LOG(DAU))	-0.030242	0.021174	-1.428227	0.1810
D(LOG(DAK))	-0.010780	0.003431	-3.142377	0.0094
D(LOG(PAD))	-0.002471	0.004720	-0.523452	0.6110
D(GROWTH)	0.000502	0.000934	0.537385	0.6017
D(IPM)	0.012223	0.011261	1.085415	0.3010
ECT(-1)	-1.464829	0.392508	-3.731971	0.0033
C	-0.000958	0.006837	-0.140052	0.8912
FITTED^2	13.20859	17.92112	0.737041	0.4765
R-squared	0.728611	Mean dependent var		0.002737
Adjusted R-squared	0.555910	S.D. dependent var		0.016845
S.E. of regression	0.011226	Akaike info criterion		-5.845669
Sum squared resid	0.001386	Schwarz criterion		-5.448011
Log likelihood	63.53386	Hannan-Quinn criter.		-5.778370
F-statistic	4.218897	Durbin-Watson stat		1.677604
Prob(F-statistic)	0.016904			